

ANALISA

1978 -8

Berbagai Masalah Dalam Negeri



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

Pemimpin Redaksi/

Penanggung jawab

Dewan Redaksi

: Kirdi DIPOYUDO

: Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR,
J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA, M. Hadi SOESASTRO,
Harry TJAN SILALAH dan Jusuf
WANANDI

Redaksi Pelaksana : Kirdi DIPOYUDO, Rufinus LAHUR

STT : S.K. Menpen R.I. No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978, tgl. 28—8—1978

Harga per eks : Rp. 700,—

Harga langganan 1 tahun (12 nomor) : Rp. 8.000,— (bayar di muka), untuk Mahasiswa Rp. 7.200,— sudah termasuk ongkos kirim.

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat,
Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta Pusat, Telepon 349489

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

PENGANTAR REDAKSI

578

B. HOESSEIN,

PENENTUAN BATAS—BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI/DAERAH OTONOM : SUATU
PEMIKIRAN BERORIENTASI PADA PEMBA—
NGUNAN

581

B. DARUS,

POLA PEMBANGUNAN DESA PANTAI
(COASTAL AREA DEVELOPMENT) — PROGRAM
TIGA TAHUN PEMBANGUNAN DESA PANTAI
PROPINSI SUMATERA UTARA

591

Hadi SOESASTRO,

PASARAN OBLIGASI INTERNATIONAL SEBAGAI
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

630

Christianto WIBISONO,

MANAJEMEN ABRI "GAYA M. YUSUF"

646

DAFTAR PUBLIKASI CSIS

656

PENGANTAR REDAKSI

Pada umumnya ada tiga pertanyaan penting yang melekat pada setiap pembangunan, yaitu siapa atau golongan mana akan mendapat manfaatnya secara langsung, di mana pembangunan itu dilaksanakan dan bagaimana pembiayaannya. Ketiga kompleks masalah ini telah menjadi isu tersendiri dalam masyarakat kita karena memang sangat terasakan adanya ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar golongan masyarakat serta ketergantungan pada luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri demi melengkapi dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan.

Usaha pembangunan melalui rangkaian PELITA pada dasarnya bermaksud untuk secara bertahap mengatasi masalah-masalah itu. Usaha untuk meratakan pembangunan di seluruh tanah air tidak lain berarti mengfungsionalkan semua daerah, agar tiap-tiap daerah tidak sekedar merupakan satu kesatuan yuridis formal belaka, akan tetapi benar-benar merupakan satu kesatuan yang fungsional dalam arti luas termasuk arti ekonomi (sebagai kesatuan ekonomi). Masalahnya ialah sejauh mana satuan yang sudah ada sekarang ini, yaitu wilayah administrasi/daerah otonom, dapat melakukan tugas-tugas pembangunan seperti yang diharapkan dari padanya. Untuk itu mungkin asumsi-asumsi perlu dipertanyakan kembali, termasuk batas wilayah administrasi/daerah otonom yang bersangkutan. Dalam

hubungan ini B. HOESSEIN menyumbangkan tulisan yang berjudul "Penentuan Batas-batas Wilayah Administrasi/Daerah Otonom : Suatu Pemikiran yang Berorientasi pada Pembangunan".

Unit terkecil atau basis dari tubuh Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Desa, yang akhir-akhir ini mendapat perhatian yang semakin besar dan konkrit, seperti adanya INPRES Bantuan untuk Desa di seluruh Indonesia. Diharapkan bahwa bantuan dari luar semacam itu dapat merangsang kegiatan warga Desa untuk mengembangkan potensi Desanya masing-masing. Dengan ditingkatkannya pembangunan dari bawah ini, maka segera muncul aneka masalah Desa yang berbeda dari Desa ke Desa sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Kekhasan itu tidak saja adalah akibat perbedaan potensi ekonomi, perbedaan latar belakang sejarah, tingkat perkembangan dan keadaan sosial budaya, akan tetapi juga akibat perbedaan yang timbul dari letak geografinya walaupun mungkin keadaan sosial budayanya relatif homogen. Misalnya ada Desa yang terletak di lingkungan kota, di pedalaman, di pegunungan dan di pantai seluruh kepulauan Indonesia. Mengidentifikasi masalah-masalah Desa menurut letaknya ini mungkin dapat membantu kita dalam merumuskan strategi pengembangan Desa yang lebih tepat ditinjau dari kekhasan Desa masing-masing. Salah satu dari usaha itu ialah yang dilakukan di Propinsi Sumatera mengenai Desa Pantai. Hal ini diuraikan oleh B. DARUS dalam tulisannya "Pola Pengembangan Desa Pantai. Program Tiga Tahun Pembangunan Desa Pantai Propinsi Sumatera Utara".

Pada pertengahan tahun 1978 ini Pemerintah Indonesia telah menjual obligasi RI di Jepang, sebagai suatu cara untuk menarik modal internasional bagi pembangunan. Walaupun jumlahnya hanya 2% dari keseluruhan pinjaman Pemerintah Indonesia untuk tahun anggaran 1978/1979, dirintisnya cara baru ini dapat dianggap sebagai suatu kemajuan dalam turut memanfaatkan dana yang tersedia di pasaran modal internasional. Hal itu dibahas dalam karangan Hadi SOESASTRO "Pasaran Obligasi Internasional Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan".

Menteri Hankam/Pangab Jenderal TNI M. Yusuf telah cukup menarik perhatian masyarakat pada awal jabatannya dengan orientasinya yang konkrit pada kesejahteraan para prajurit, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar mereka sebagai manusia dan prajurit. Hal itu diulas oleh Christianto WIBISONO dalam tulisannya yang berjudul "Manajemen ABRI 'Gaya M. Yusuf'". Orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebetulnya tidak saja diperlukan untuk kalangan terbatas seperti ABRI, akan tetapi seharusnya diterapkan untuk seluruh bangsa. Hal ini akan memperkecil jurang kaya-miskin dan sekaligus membina solidaritas nasional dalam menghadapi pelbagai masalah bangsa. Dengan demikian juga akan menjadi semakin jelas bahwa pembangunan yang kita lakukan ditujukan untuk perbaikan mutu kehidupan seluruh masyarakat bangsa tanpa kecuali.

Agustus 1978

REDAKSI

PENENTUAN BATAS—BATAS WILAYAH ADMINISTRASI/DAERAH OTONOM : SUATU PEMIKIRAN BERORIENTASI PADA PEMBA—NGUNAN*

B. HOESSEIN

I

Desentralisasi dan dekonsentrasi tampaknya merupakan istilah-istilah yang sederhana, tetapi dalam diskusi-diskusi ilmiah seringkali mengundang banyak reaksi yang sangat berarti dan mendasar sifatnya. Kedua istilah itu tidak saja kaya akan isi konseptual dan pengertian empiris, tetapi juga mengandung konotasi-konotasi nilai.¹ Pada umumnya keduanya dipandang sebagai sesuatu yang baik dan menjadi tumpuan harapan dan tuntutan rakyat, sedangkan sentralisasi dipandang sebagai sesuatu yang buruk dan karena itu ditolak. Desentralisasi dan dekonsentrasi dapat berarti : formulasi kebijaksanaan dan aplikasinya lebih realistis; pembuatan hukum tertulis lebih mencerminkan kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat setempat sehingga dapat mengurangi timbulnya formalisme;² pelaksanaan hukum lebih efektif, pengambilan

* Prasaran pada Seminar Interen yang diselenggarakan oleh PUSAT STUDI HUKUM dan ADMINISTRASI (tgl. 25—26 April 1978) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

1 Lihat A.H. Hanson, "Decentralization", dalam *Decentralization : Political, Administrative and Economic*, Laporan Kongres Sedunia Keenam International Political Science Association, 1964

2 Lihat Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The theory of Prismatic Society* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1964)

keputusan lebih cepat, beban pemerintah pusat lebih ringan;¹ partisipasi rakyat diharapkan lebih meningkat, memunculkan kepemimpinan yang lebih banyak, melatih rakyat setempat lebih mahir dalam berpemerintahan dan demokrasi, dan penarikan sumber-sumber dana lebih intensif dan efektif. Idealisme itu mungkin juga ada pada benak pembentukan UUD 1945 — sekalipun dalam horizon yang tidak sama — sehingga mereka meletakkan pasal 18 sebagai landasan hukum tertinggi bagi kedua sistem itu.

Sebagai konsep, keduanya tidak hanya menunjuk pada hal-hal yang statis, namun mencakup pula proses — dinamis. Dalam praktek keduanya saling terjalin, sangat rumit serta banyak melibat dan menyentuh berbagai aspek. Pada kesempatan ini penulis ingin mencoba membahas salah satu aspek dari kedua sistem itu yaitu pertalian antara wilayah dan administrasi dalam hubungannya dengan penyelenggaraan kedua sistem itu di bidang pemerintahan, dengan jalan mengajukan serangkaian pertanyaan sebagai berikut : (1) bagaimanakah penentuan batas-batas wilayah administrasi dan daerah otonom serta hubungan satu dengan lain menurut teori dan praktek di Indonesia? (2) faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan batas-batas itu secara teoritis dan praktis di Indonesia? (3) dapatkah pertimbangan-pertimbangan itu dipertahankan mengingat orientasi administrasi telah mengalami perubahan dari hukum dan ketertiban ke pembangunan?

II

Pertanyaan pertama dapat dicari jawabannya melalui pengamatan terhadap tipologi pemerintahan daerah yang oleh Robert C. Fried dinamakan "sistem fungsional" (functional system), "sistem prefektur tak terintegrasi" (unintegrated prefectoral system) dan "sistem prefektur terintegrasi" (integrated prefectoral system).²

1 Lihat Emil J. Sady, "Improvement of Local Government and Administration for Development", dalam Nimrod Raphaeli (ed), *Readings in Comparative Public Administration* (Boston: Allyn and Bacon Inc., 1967)

2 Lihat R.C. Fried, *The Italian Prefects: A Study in Administrative and Political Decentralization* (New Haven — London : Yale University Press, 1963)

Menurut sistem fungsional, dalam rangka dekonsentrasi tiap Menteri menempatkan Kepala-kepala Instansi Vertikal untuk melaksanakan kebijaksanaan dan melakukan pelayanan-pelayanan umum dalam bidang administrasi Departemen yang bersangkutan (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain). Bagi tiap-tiap Kepala Instansi Vertikal itu ditetapkan suatu wilayah administrasi dengan penentuan batas-batas yang didasarkan atas kriteria menurut keperluan Departemen yang bersangkutan seperti pembagian beban tugas, jenjang pengawasan dan efisiensi administrasi pelayanan-pelayanan umum. Tidaklah mengherankan apabila pada sistem ini kita jumpai luas dan batas wilayah administrasi seorang Kepala Instansi Vertikal dari satu Departemen yang tidak sama dengan luas dan batas wilayah administrasi Kepala Instansi Vertikal dari Departemen lainnya.

Instruksi dilakukan secara langsung dari Menteri kepada Kepala Instansi Vertikal dan sebaliknya Kepala Instansi Vertikal bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dilimpahkan kepadanya terhadap Menteri yang bersangkutan. Tidak adanya Wilayah Administrasi di bawah pimpinan Gubernur (seperti Propinsi) akan mempersulit masalah-masalah koordinasi horizontal. Oleh karena itu, biasanya koordinasi yang bersifat politis dilakukan di tingkat pusat, sedangkan koordinasi di tingkat daerah dilakukan apabila dipandang perlu melalui pembentukan panitia antar departemental yang bersifat sementara. Pola organisasi pada sistem ini lebih didasarkan pada pengutamaan fungsi yang lazim disebut "fragmented field administration".¹

Batas dan luas wilayah administrasi yang berbeda-beda seperti di atas semakin rumit dengan adanya penarikan batas-batas dari suatu daerah otonom (dalam rangka desentralisasi) yang tidak perlu mengikuti salah satu batas wilayah administrasi. Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan segala aparatur pemerintahan di tingkat daerah bersifat kurang penetratif dibandingkan dengan sistem prefektur dan dilakukan melalui proses legislatif.

¹ Lihat Leelans, *Changing Patterns of Local Government* (The Hague, 1973)

Berbeda dengan sistem fungsional, pada sistem prefektur didapati ciri-ciri umum sebagai berikut : (1) wilayah nasional dibagi kedalam beberapa Wilayah Administrasi (Umum) dengan nama yang bervariasi menurut masyarakat bangsa yang bersangkutan (provinces; departments; governments; prefektures); (2) pada tiap-tiap Wilayah Administrasi itu ditempatkan seorang Wakil Pemerintah Pusat dengan gelar yang juga bervariasi (Governor; Prefect) yang menjalankan fungsi-fungsi : (a) perwakilan sosial dan politik dari pemerintah pusat; (b) mempertahankan hukum dan ketertiban di Wilayahnya; (c) supervisi terhadap aktivitas-aktivitas penjabat-penjabat pusat yang beroperasi dan pemerintah daerah yang terdapat di dalam yurisdiksi wilayahnya; (3) dalam menjalankan fungsi-fungsi itu ia bebas dari kekuasaan kehakiman; (4) ia merupakan penjabat yang diangkat atas dasar karir atau politis, yang sewaktu-waktu dapat digeser dari kedudukannya; dan (5) bertanggung jawab kepada serta dikendalikan oleh Departemen Dalam Negeri.

Ciri-ciri itu dapat dijumpai baik pada sistem prefektur tak terintegrasi maupun sistem prefektur terintegrasi. Adapun yang membedakan kedua sistem itu terletak pada ciri-ciri khusus masing-masing. Dalam hal dianut sistem prefektur tak terintegrasi, maka penentuan batas-batas wilayah administrasi seorang Kepala Instansi Vertikal sama dengan penentuan batas-batas itu pada sistem fungsional. Namun demikian, penentuan batas-batas itu harus berada pada yurisdiksi wilayah administrasi seorang Gubernur dan tidak dibenarkan melintasi batas Wilayah Administrasi Gubernur lainnya. Hubungan fungsional antara Kepala-kepala Instansi Vertikal dan Menteri yang bersangkutan juga sama dengan hubungan kedua aparaturnya itu pada sistem fungsional. Sedangkan hubungan antara Kepala-kepala Instansi Vertikal dan Gubernur adalah hubungan koordinatif belaka.

Pola penentuan batas-batas seperti yang disebutkan di atas juga berlaku bagi penentuan batas-batas suatu daerah otonom, dalam arti batas-batas daerah otonom tidak perlu mengikuti batas-batas Wilayah Administrasi Gubernur tetapi harus dilakukan dalam yurisdiksi Wilayah Administrasi Gubernur.

Situasi demikian memungkinkan sekali terjadinya pemisahan jabatan Gubernur dari jabatan Kepala Daerah dan penempatannya di tangan personalia yang berbeda.

Lain halnya dengan sistem prefektur terintegrasi. Seperti tampak pada kata *integrasi*, maka pada sistem yang ketiga ini terdapat beberapa elemen yang diintegrasikan. Pertama, elemen wilayah : batas-batas Wilayah Administrasi di bawah yurisdiksi Gubernur dipergunakan sebagai batas-batas bagi pelayanan-pelayanan umum seluruh Kepala Instansi Vertikal yang beroperasi dan sebagai batas-batas dari daerah otonom. Kedua, elemen jabatan: konsekwensi batas-batas wilayah semacam itu menempatkan pula Gubernur pada posisi "dual function" yaitu dirangkapnya jabatan Kepala Daerah olehnya. Ketiga, kedudukan Gubernur berada pada tingkat supremacy, dimana ia bukan saja koordinator tunggal tetapi merupakan saluran tunggal bagi segala informasi dan instruksi yang berasal dari berbagai Menteri ditingkat Pusat kepada Kepala-kepala Instansi Vertikal. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa Gubernur selaku orang kepercayaan Pusat berfungsi sebagai integrator di dalam wilayahnya.

Dibandingkan dengan sistem fungsional, maka organisasi pada sistem ini lebih mengutamakan dasar-dasar wilayah yang lazim disebut "integrated field administration". Sedangkan pengawasan pusat terhadap aparatur pemerintahan di tingkat daerah adalah lebih penetratif, melalui proses administrasi dan dilakukan oleh Gubernur.

Sistem prefektur terintegrasi ini berasal dari jaman Merkantilisme dan kemudian dikembangkan di Perancis oleh Napoleon Bonaparte. Sekalipun tidak secara sepenuhnya — karena sebagai sistem selalu bervariasi akibat lingkungannya — sistem ini tampak dianut di Indonesia seperti dapat dilihat pada pasal 2, pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), pasal 79 ayat (1) dan (2), pasal 80, pasal 81 dan pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (UU tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah). Dianutnya sistem ini di Indonesia adalah melalui proses sejarah dan ditopang oleh berbagai faktor ekologis lainnya.

Seperti dikemukakan di atas, sistem prefektur terintegrasi dikembangkan oleh Napoleon Bonaparte. Untuk mendalami sistem ini lebih lanjut diperlukan suatu pendekatan behaviorism. Seperti seorang militer menampakkan pengaruh konsepsi pertanggungjawaban, kewenangan dan efesiensi adalah dibawah pengarahannya seseorang yang lazim terdapat pada organisasi militer ke dalam sistem ini. Sikap tokoh ini yang expansionis terhadap daerah-daerah disekelilingnya pada saat itu agaknya berpengaruh pula dalam penentuan batas-batas Wilayah Administrasi seorang Gubernur yang berkaitan dengan wilayah konsentrasi suku-suku bangsa (ethnic boundary) yang telah berada di bawah kekuasaannya. Bahkan menurut pengamatan Fried, sistem prefektur terintegrasi seringkali dipergunakan sebagai senjata untuk mengatasi ancaman bahaya yang datang dari suku-suku atau kekuatan sosial dan ekonomi yang berkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Dengan jalan menempatkan seorang Gubernur di wilayah-wilayah itu dengan segala atribut yang dimilikinya, maka Gubernur dapat melakukan keseimbangan kepentingan, menetralisasi keadaan dan menciptakan stabilitas politik di wilayahnya. Hal demikian itu barangkali yang menyebabkan Williams sampai pada satu pernyataan : "Gubernur berada pada baris terdepan dalam hal pemerintah melawan musuh-musuh dari dalam negeri".¹

Faktor-faktor kesukuan sebagai pertimbangan dalam penentuan batas-batas Wilayah Administrasi seperti di atas dilakukan pula oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu. Baik pembentukan Wilayah-wilayah Administrasi dan Daerah-daerah otonom melalui perundang-undangan desentralisasi (UU 1903 dan UU 1922) maupun melalui kontrak-kontrak (lange kontrakt dan korte verklaring) mencerminkan faktor-faktor kesukuan. Secara sadar atau tidak sadar cara demikian terus berlangsung pada tahun limapuluhan dan tahun enam puluhan. Kadangkadang faktor kesukuan ini berbauran dengan faktor-faktor lain seperti geofrasis, agama dan perkembangan sejarah setempat. Jejak-jejak ini kini masih tampak jelas dan terbentang dipersada tanah air kita. Tidakkah mengherankan apabila luas dan batas

1 P.M. Williams, *Crisis and Compromise : Politics in the Fourth Republic* (London : Longmans, 1964)

Wilayah Administrasi/Daerah Otonom yang satu dengan yang lain berbeda secara menyolok sekali. Persoalan kini timbul : apakah kita tetap akanelihara keadaan demikian atau kita sempurnakan menurut hembusan nafas administrasi yang berbau orientasi pada pembangunan? Bukankah tugas-tugas Gubernur pada masa kini jauh lebih berat sehubungan dengan predikat Administrator Pembangunan diwilayahnya?

III

Proses perubahan-perubahan sosial melanda negara-negara berkembang. Di dalam proses itu terdapat pula proses atau usaha pembangunan. Faktor-faktor pendorong proses pembangunan itu dapat datang dari dalam dan dari luar masyarakat bangsa yang bersangkutan. Dalam lingkungan masyarakat yang sedang mengalami proses seperti itu administrasi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, lebih berorientasi pada tugas-tugas pembangunan. Adanya gagasan-gagasan yang tumbuh mengenai perlunya proses pembangunan dari dua arah, dari atas dan dari bawah, memaksa administrasi pemerintahan daerah untuk memiliki kemampuan sebagai promotor pembangunan sosial dan ekonomi di daerahnya¹ dan memberikan sumbangannya untuk tetap konsisten dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan (pembangunan) nasional. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh administrasi pemerintahan daerah sejauh mungkin harus diatasi dalam usaha penyempurnaan administrasi untuk tugas-tugas pembangunan.

Penyempurnaan administrasi pemerintahan daerah pada negara-negara yang sudah maju telah lama dilaksanakan. Masalah-masalah yang menyangkut penentuan batas-batas wilayah administrasi/daerah otonom tidak luput pula dari usaha penyempurnaan administrasi itu. Dengan berbagai cara yang mendasarkan diri dari hasil-hasil penelitian di negara-negara tersebut dilakukan penataan kembali (redivisi) batas-batas wilayah administrasi/daerah otonom. Hambatan-hambatan yang timbul secara sistematis dapat diatasi dengan baik.

¹ *Local Government as Promotor of Economic and Social Development* (The Hague : IULA, 1971)

Penyempurnaan administrasi pemerintahan daerah di Indonesia juga telah dilakukan melalui serangkaian pergantian produk hukum (UU No. 22/1948; UU No. 1/1957; UU No. 18/1965; UU No. 5/1974). Akan tetapi pokok masalah yang penulis bahas ini agaknya belum menjadi sasaran dari usaha penyempurnaan itu. Sedangkan hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh penentuan batas-batas wilayah administrasi/daerah otonom yang ada sebagai peninggalan sejarah itu diduga semakin terasa. Keadaan di Maluku mungkin dapat merupakan ilustrasi dari pembahasan ini. Sebagai satu Propinsi/Daerah Otonom Tingkat I, Maluku terdiri atas lebih dari 20 pulau dengan luas daratan 85.728 Km² dan luas lautan 765.272 Km². Wilayah Gubernur yang terpencar di berbagai pulau itu diikuti pula oleh wilayah administrasi/daerah otonom yang lebih rendah (Kabupaten/Daerah Otonom Tingkat II). Satu Kabupaten meliputi beberapa pulau dengan tingkat perhubungan yang relatif rendah. Sudahkah kita memikirkan bagaimana penguasa tunggal di wilayah itu melakukan koordinasi terhadap proyek-proyek pembangunan sektoral dan regional yang terpencar-pencar menurut pulau-pulau, mempertahankan hukum dan ketertiban di wilayahnya?; bagaimana anggota-anggota DPRD mengadakan sidang dalam waktu-waktu yang mendesak untuk memenuhi panggilan pembangunan; apakah pelayanan-pelayanan umum dapat menjangkau warga masyarakat yang terpencar-pencar ke pelosok itu secara efisien dan efektif? Walaupun jawaban-jawaban yang dapat diberikan memerlukan penelitian terlebih dahulu, sudah patut diduga kesulitan-kesulitan yang menyertai pemetaan seperti sekarang ini.

Suara keluhan terhadap luas wilayah yang ada telah lama berkumandang di DKI Jakarta. Keluhan di sini merupakan refleksi dari keadaan yang berlawanan dengan Maluku atau Kalimantan Barat atau Irian Jaya dan lain-lain.

Pertambahan penduduk yang terus meningkat, baik karena kelahiran maupun urbanisasi, adanya perkembangan yang pesat sekali dari kota Jakarta (dewasa ini luas kota 56.000 Ha dan diperkirakan menjadi 61.000 Ha pada tahun 1985), proses industrialisasi yang pesat, untuk menjamin adanya kelancaran dan

efisiensi di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pembiayaan pembangunan daerah pada masa yang akan datang maka diperlukan perluasan wilayah. Luas wilayah yang sekarang dipandang tidak lagi memadai terhadap tuntutan di atas sehingga perlu dilakukan pemekaran sampai mencapai luas optimal bagi administrasi pemerintahan DKI Jakarta. Luas wilayah administrasi sekarang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden RIS 1950/125 (BN 1950/18) lebih sempit dari pada luas wilayah administrasi pada saat Gewest Batavia en Ommelanden dahulu yang meliputi Teluk Naga, Sepatan, Batucapeur, Tangerang, Curug, Legok, Serpong, Cileungsi, Setu, Bekasi, Tambun, Cibitung, Babelan, Sukatani, Bojong dan Cabang Bungin. Wilayah-wilayah yang kiri tidak dibawah yurisdiksi DKI Jakarta menurut Keputusan Presiden di atas diserahkan kepada Negara Bagian yang berhak.

Apa yang terjadi di DKI Jakarta sebaiknya tidak dipandang sebagai masalah khusus setempat, tetapi sebaiknya dilihat dari horizon yang lebih luas dan dari dimensi nasional. Sekalipun pemetaan DKI Jakarta tidak didasarkan pada faktor kesukuan-bahkan DKI merupakan satu satunya daerah yang heterogeen dalam arti suku —, setidaknya-tidaknya kita dapat mengidentifikasinya sebagai satu masalah yang timbul sehubungan dengan pemetaan wilayah administrasi/daerah otonom yang tidak memadai untuk fungsi-fungsi administrasi. Situasi demikian menurut Schnur dapat menimbulkan masalah politik, karena gagalnya pelayanan-pelayanan dari administrasi terhadap warga masyarakat.¹

IV

Apabila kita telah dapat mengidentifikasi masalah itu mungkin kita perlu meningkat ke arah yang lebih maju, yaitu perlunya dilakukan penelitian-penelitian yang bersifat multi dan interdisipliner ke arah usaha penyempurnaan penentuan batas-batas wilayah administrasi/daerah otonom yang lebih menunjang tugas-tugas pembangunan. Penelitian-penelitian semacam

¹ Lihat Roman Schnur, "Area and Administration", dalam *International Social Science Journal*, Vol. XXI (1969), No. 1; lihat juga James W. Fessler, *Area and Administration* (University of Alabama, 1949)

itu ada baiknya dilakukan dalam kerjasama dengan atau dikordinasikan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, suatu badan yang existensinya diatur dalam pasal 10 UU No. 5/1974.

Tanpa mengubah sistem prefektur terintegrasi, dengan segala kebaikan dan kelemahannya, kita menjajagi penerapan pertimbangan faktor-faktor di bawah ini dalam penentuan batas-batas wilayah administrasi/daerah otonom agar dapat diperoleh semacam "catchment area". Faktor-faktor tersebut adalah :

- (1) fungsi wilayah terhadap perekonomian daerah dan nasional yang lebih khas sifatnya;
- (2) sumber-sumber pajak yang dapat digali secara potensiil dan riil sehingga dapat tercapai keseimbangan di antara berbagai wilayah/daerah;
- (3) efisiensi dan efektivitas pelayanan-pelayanan terhadap warga masyarakat dalam suatu wilayah yang merupakan luas optimal untuk itu;
- (4) partisipasi rakyat yang dapat diraih secara efektif dan pengawasan timbal balik antara warga dan birokrasi daerah.

Demikian saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan dalam usaha ikut serta menyempurnakan apa yang mungkin belum sempurna.

POLA PEMBANGUNAN DESA PANTAI (COASTAL AREA DEVELOPMENT) — Program Tiga Tahun Pembangunan Desa Pantai Propinsi Sumatera Utara

B. DARUS*

PENDAHULUAN

Kepulauan Indonesia berada dalam posisi silang yang diapit tidak saja oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi juga oleh dua benua yakni Asia dan Australia. Posisi ini menempatkan Indonesia dalam pola strategi antar bangsa, baik dalam kedudukannya sebagai gerbang lalu-lintas maupun kekayaan lautannya. Oleh karenanya maka lautan tersebut tidak saja harus dilihat dari posisinya yang strategis, tetapi juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seyogianya dimanfaatkan bagi membuahkan kemakmuran rakyat untuk selanjutnya menjadi perisai pertahanan nasional khususnya Selat Malaka.

Kawasan pedesaan sepanjang Pantai Timur (Selat Malaka) dan Pantai Barat Sumatera Utara, memerlukan pembinaan khusus, baik unsur geografi maupun unsur demografi (masyarakat nelayan dalam kerangka pembinaan territorial dan pembinaan wilayah). Tujuan pembinaan itu ialah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi — sosial masyarakat pedesaan pantai. Dengan meningkatnya taraf kehidupan, maka masyarakat pedesaan pantai tersebut akan dapat diandalkan par-

* Direktur Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan

tisipasi mereka dalam usaha memelihara dan meningkatkan Ketahanan Nasional. Untuk dapat melaksanakan pembinaan pedesaan pantai tersebut secara efektif, hendaknya ia diselenggarakan berdasarkan suatu pola rencana yang konsepsional dalam kerangka Pembangunan Nasional (REPELITA).

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Tahapan Pembangunan Masyarakat Desa adalah pengembangan Desa Swadaya menjadi Swakarya, Desa Swakarya menjadi Desa Swasembada dan seterusnya menuju Desa Pancasila. Strategi pembangunan desa didasarkan pada desa-pertanian dan pembangunan desa-pantai. Tipologi pedesaan ini dihubungkan dengan kemungkinan peng-wilayahan Propinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu dan Simalungun, dimana terdapat desa-desa pantai dan pertanian.
- b. Kawasan daerah pegunungan meliputi Kabupaten Karo, Dairi, Tapanuli Utara dan sebagian Simalungun memiliki desa-desa pertanian (padi dan non-padi).
- c. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan sebagian kecil Dairi mempunyai desa-desa pertanian dan pantai.

Upaya pembangunan desa-desa tersebut dilakukan dengan kebijaksanaan operasional yang berbeda disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Untuk pedesaan yang berpotensi tinggi akan diikhtiarkan penanaman modal, sedangkan untuk pedesaan yang berpotensi rendah akan dilakukan kegiatan peningkatan produksi dengan penanggulangan faktor-faktor penghalangnya ataupun pengalihan kegiatan-kegiatan ke arah upaya yang lebih produktif. Strategi ini memperhitungkan baik dalam jenis komoditi yang diperdagangkan antar pulau ataupun kelancaran komoditi-kebutuhan yang perlu didistribusikan ke dalam lingkungan wilayah pedesaan untuk selanjutnya diteruskan ke desa pedalaman agar dengan demikian terdapat dua arah lalu-lintas yang saling mengisi.

PEMBANGUNAN DESA PANTAI

Pembangunan Desa Pantai adalah bagian integral Pembangunan Masyarakat Desa. Masyarakat yang berdiam di sepanjang pantai Selat Malaka bahkan di seluruh Indonesia, memerlukan pola rencana pembangunan konsepsional strategis yang merupakan komponen Pembangunan Nasional. Peristilahan pembangunan pedesaan yang menjadi fokus dalam Repelita III nanti seyogianya dapat diperinci dan diperluas sebagai berikut :

- a. Rural Development (Pembangunan Desa Pedalaman),
- b. Coastal Area Development (Pembangunan Pedesaan Pantai),
- c. Mountainous Area Development (Pembangunan Desa Pegunungan),
- d. Urban Area Development (Pembangunan Desa Perkotaan).

Pembangunan desa pantai itu pada hakekatnya adalah pemanfaatan hasil laut bagi lapangan hidup rakyat serta kaitannya dengan pembangunan wilayah bagi pembangunan regional dan nasional. Dengan demikian maka persiapan desa-desa sebagai basis pembangunan nasional dalam Repelita III nanti untuk dapat diantarkan ke jenjang Swasembada akan lebih mantap.

PEMBANGUNAN WILAYAH

Area-development adalah pembangunan wilayah ataupun lokalitas (kampung) dalam suatu distrik ataupun dalam wilayah Kabupaten. Dalam Repelita I — II lautan hanya dilihat melulu secara sektoral yang dalam jangka panjang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (GNP) dengan merangsang modal asing dan domestik untuk mengolah hasil laut dengan teknologi lanjutan. Akibatnya ialah wilayah-wilayah pinggiran pantai sepanjang Selat Malaka mengeluh karena manfaat lautan terhadap wilayah mereka sudah lenyap dan operasi trawler yang menyeret pukat harimau (trawl-net) di dasar laut horizontal dengan pantai dalam rangka memperebutkan fishing-ground yang subur dalam kawasan perikanan rakyat akhirnya mendesak kehidupan rakyat kecil.

HAKEKAT PEMBANGUNAN PEDESAAN PANTAI

Rencana Pembangunan Lima Tahun I telah menguraikan secara terperinci tentang kategori desa, nilai potensi desa, modal desa, dan problematik masyarakat desa. Fokus persoalan ialah modal dasar yang terdiri dari manpower dan alam (tanah) untuk pertanian, di mana manusia yang mengolahnya dinamakan petani. Hakekat desa pantai inipun analog dengan desa pertanian tersebut, yakni modal dasarnya manpower dengan lautan (alam) sebagai garapan untuk hidup dan kehidupan; sedangkan manusianya dikenal dengan predikat nelayan. Pembangunan desa berorientasi pada pembangunan kesejahteraan manusianya (potensi), sesuai dengan rencana dan sasaran pembangunan, yakni oleh manusia dan untuk manusia berwujudkan kemakmuran badaniah dan rohaniah. Oleh karenanya pula persoalan pembangunan desa pantai inipun memiliki karakteristik yang sama. Pembesaran produksi harus dikaitkan dengan kemakmuran berupa tersedianya lapangan hidup yang luas. Oleh karenanya pula pembangunan pedesaan pantai itu merupakan komponen yang komplementer dalam pembangunan regional dan nasional.

Pedesaan pantai langsung berhadapan dengan lautan, maka mayoritas penduduknya menggarap hasil laut sebagai sumber penghidupan. *Subjek pedesaan pantai* itu adalah *masyarakat nelayan* dengan ruang gerak hidup dan kehidupannya. Strategi kenelayanan adalah suatu kegiatan ekonomi analog dengan pertanian. Dengan demikian jelas bahwa lautan tidak melulu dilihat sebagai gerbang lalu-lintas, tetapi ia juga harus dikaitkan dengan masalah pembangunan ekonomi nasional. Lautan sebagai sumber daya alam yang mempunyai arti penting dalam dunia perdagangan, perekonomian dan keamanan harus dikaitkan pula dengan kemakmuran rakyat. Dengan demikian terciptalah trilogi pembangunan, yakni stabilitas sosial politik, pertumbuhan ekonomi yang semakin mantap dan pemerataan pendapatan rakyat.

ISTILAH PERIKANAN

Istilah perikanan ini disadur dari bahasa asing yakni Fishery dan terkait erat di dalam pengertiannya itu produksi hasil laut yang melulu bersifat komersil (commercial fishery). Dengan menyebut perikanan, maka asosiasi banyak orang akan selalu bersifat business-like yakni produksi hasil laut serta perdagangannya. Istilah tersebut melupakan kita kepada manusia yang berdiam jauh di pedalaman pantai yang umumnya terpisah jauh dari jaringan komunikasi yang dikenal dengan identitas Nelayan.

PRA ANGGAHAN

Studi Gross Regional Product Propinsi Sumatera Utara 1969/1975 telah memperlihatkan bahwa kenaikan pendapatan perkapita lebih besar di perkotaan daripada di pedesaan, karena pengembangan segala bentuk modernisasi justru berada di kawasan perkotaan. Pengangguran dan under-employment menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk di mana produktivitas pertanian dan ekspor processed-goods praktis belum ada oleh karena penyuluhan pembinaan perdagangan dan agro-industri di kawasan pedesaan belum diperkembangkan. Rendahnya produktivitas ini menyebabkan peningkatan rural under-employment dan melebarnya jurang antarpedesaan dan perkotaan, sehingga urbanisasi menyebabkan pula terdapatnya pengangguran di kota-kota. Bila dibiarkan keadaan ini berlanjut, tentu membuat keadaan yang semakin memburuk.

Usaha perikanan rakyat tidak dapat berkembang wajar tanpa dibina khusus oleh Pemerintah Daerah untuk diantarkan ke jenjang bank-ability, sedangkan usaha industri perikanan (modal besar) yang sebahagian besar dimiliki oleh pengusaha asing dan modal-kuat akan berkembang dengan pesatnya. Ketidak-seimbangan antara usaha modal kecil dan usaha modal besar, ditambah dengan tidak terkendalinya batas-batas kawasan operasi antara kedua golongan usaha itu serta tidak tersedianya fishing ground yang subur sebagai arena garapan bagi rakyat, akan dapat mengakibatkan bentrokan fisik yang merugikan.

Bila perikanan kecil tidak dibina secara konsepsional oleh Pemerintah Daerah yang terjalin dalam Pola Pembangunan Daerah, maka dalam jangka panjang rakyat desa pantai akan terpaksa pindah ke kawasan pedalaman akibat himpitan modal kuat. Kepindahan ini akan menimbulkan ketegangan sosial dengan segala implikasinya di kawasan pedalaman. Kepindahan rakyat tersebut ke kawasan pedalaman berarti membuka pintu seluas-luasnya bagi kegiatan petualangan oleh karena tidak ada lagi nelayan yang mengarungi lautan (khususnya Selat Malaka) sebagai pengawal Wawasan Nusantara. Kesemuanya itu akan merugikan Hankamnas mengingat situasi rawan dalam kawasan pantai Timur Sumatera dimana justru dapat diharapkan loyalitas dan patriotisme rakyat pantai untuk turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan menghadapi lawan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hak ulayat rakyat pedesaan pantai atas luas perairan, sebagai ruang hidup dan kehidupan rakyat yang berjarak sejauh tembakan bedil perlu dipelihara.

Desa-desi pantai yang berjumlah 219 buah tidak akan dapat diantarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten ke jenjang swasembada menuju Desa Pancasila sesuai dengan strategi Pembangunan Masyarakat Desa. Bila kekayaan lautan tidak jelas kaitannya dengan pembangunan wilayah, sirnalah andil devisa yang dipersembahkan rakyat kecil sebesar US \$ 34 juta tahun 1977 atau 25% dari jumlah devisa nasional yang berasal dari hasil lautan. Pembangunan wilayah (Area development) dalam lingkungan Kabupaten tidak dapat sukses bila pembinaan usaha perikanan rakyat (mikro) tidak bersandar kepada kepentingan pembangunan wilayah Kabupaten (makro). Keseimbangan antara pembangunan daerah dan pembangunan sektoral seperti termuat dalam GBHN tidak bisa diwujudkan bila kaitan sub-sektor perikanan tidak jelas manfaatnya bagi pembangunan wilayah (Kabupaten) dan titik berat strategi Repelita III tidak dapat berwujud bila manpower planning dalam bidang perikanan rakyat tidak dilakukan pada tingkat desa pantai.

PENDEKATAN

Pembahasan masalah pembangunan pedesaan pantai dapat ditinjau dari pendekatan pembangunan dan kesejahteraan (development and prosperity approach), disamping pendekatan Pertahanan dan Keamanan (defence and security approach). Kedua pendekatan ini tidak dapat dipisahkan oleh karena erat-nya hubungan antara satu sama lainnya dalam kerangka Pembinaan Wilayah.

KEMAKMURAN

Tujuan pembangunan pedesaan pantai menurut pendekatan pembangunan dan kesejahteraan ialah untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan pantai melalui modernisasi yang dikaitkan dengan produksi hasil laut. Modernisasi yang dimaksudkan ialah penerapan teknologi sederhana dengan kesempatan kerja sebagai prioritas area-development. Dalam hubungan ini dicatat bahwa tingkat kehidupan masyarakat pedesaan pantai dewasa ini di Sumatera Utara masih jauh lebih rendah daripada kehidupan golongan masyarakat lainnya seperti halnya dengan golongan petani.

Bertolak dari strategi pengembangan wilayah Sumatera Utara khususnya kawasan pedesaan pantai, maka kini pemikiran menerawang untuk mencari proyek apakah gerakan yang dapat menggairahkan rakyat pedesaan pantai, sehingga mekanisme ekonomi desa pantai dapat terdorong untuk bergerak sehingga Desa Swadaya dapat bergerak menuju Desa Swasembada.

Pemda Sumatera Utara telah memprioritaskan dalam Repelita II pengembangan kemajuan beberapa Kabupaten yang tertinggal jauh di belakang Kabupaten yang lainnya dan pembangunan pedesaan pantai yang diperkirakan mempengaruhi hinterland dengan program pembangunan 3 (tiga) tahun. Integrated coastal development projects adalah proyek-proyek yang akan dipusatkan dalam suatu lokalita tertentu di dalam wilayah Kabupaten yang berorientasi pada pengembangan wilayah. Adapun maksud pendekatan ini adalah untuk memanfaatkan secara sistematis tenaga kerja yang tersedia untuk digabung

ANALISA

dengan capital inputs yang relatif kecil guna mengatasi keadaan stagnasi dan meringankan masalah sosial di kawasan tersebut dengan meningkatkan produktivitas, penyediaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan rakyat sebagai resultat tersedianya lapangan kerja.

KEAMANAN

Ditinjau dari kepentingan pertahanan dan keamanan dalam rangka Pembinaan Wilayah dan Pembinaan Teritorial adalah vital untuk mempersiapkan dan memelihara daerah-daerah pedesaan pantai khususnya daerah pantai Selat Malaka sebagai ruang juang, alat juang dan kondisi juang yang ampuh terhadap setiap ancaman, baik ancaman subversi maupun ancaman musuh dalam perang nyata. Salah satu ikhtiar yang vital bagi menciptakan ketahanan mental dan fisik masyarakat pedesaan pantai tersebut adalah dengan meningkatkan perbaikan kehidupan ekonomi-sosial dan mental ideologisnya disamping peningkatan keahlian dan ketrampilan kerja mereka.

KEBIJAKSANAAN

Dirasakan sebagai salah satu urgensi untuk merangkaikan konsepsi makro dan mikro secara komprehensif dalam menggerakkan ekonomi desa pantai. Pembinaan para pelaku usaha perikanan rakyat kecil (mikro) misalnya sebagai sektor inti yang ditunjang oleh proyek sub-sektor lainnya seperti pertambakan, perkebunan kelapa, ternak bebek dan kerajinan rakyat untuk diarahkan secara jelas agar berorientasi terhadap kepentingan pembangunan kawasan Kabupaten berupa kaitannya dengan lapangan kerja, pendapatan daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat (makro) dalam kawasan Kabupaten. Dengan adanya gabungan konsep makro dan mikro tersebut maka Kabupaten akan lebih mampu untuk menggiring pembangunan wilayahnya dengan baik dan terarah.

Pembangunan wilayah (area development) dalam lingkungan pedesaan pantai akan digerakkan dengan pengembangan antar sektoral bersamaan dengan pembinaan pelaku-pelakunya yang bersandar atas kepentingan pembangunan wilayah Kabupaten. Perluasan lapangan kerja di kawasan pedesaan yang menjadi titik berat dari strategi Repelita III perlu diwujudkan secara sistematis dengan manpower planning pada tingkat desa pantai dengan program mekanisasi bertahap (teknologi sederhana) dalam perbaikan mutu peralatan dan diversifikasi kegiatan masing-masing sub-sektoral.

Dengan pendekatan pengembangan wilayah (prosperity), khususnya hubungan timbal-balik antara kota dan kawasan pedesaan, maka rakyat pedesaan perlu digairahkan dengan program-program proyektuil agar mekanisme ekonomi sektoral dan partisipasi rakyat dapat terdorong untuk bereaksi, sehingga Desa Swadaya dapat bergerak menuju Desa Swasembada (Pancasila). Dalam pelaksanaannya telah tersusun rencana untuk membangun proyek-proyek yang saling menunjang ekonomi rakyat kecil (economic generating projects) yang dikenal dengan integrated coastal development projects dalam 7 (tujuh) lokalita Desa Contoh sebagai Pusat Pengembangan.

Program Pembangunan 3 (Tiga) Tahun Desa Pantai Propinsi Sumatera Utara ini telah diselenggarakan secara koordinatif oleh Gubernur Kepala Daerah cq. Bappeda dengan sasaran agar semua pengembangan subsektor ekonomi dan lintas sektoral seperti manpower planning dan pembiayaan dapat berjalan sejajar, sinkron dan serasi dengan sasaran pembangunan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun diharapkan agar pembangunan sub-sektoral ekonomi tersebut akan bergerak dalam 7(tujuh) lokalita Desa Pantai Contoh yang akan menjelma dalam bentuk gerakan aktuil mekanisme sektoral dengan partisipasi aktif masyarakat menuju akselerasi ekonomi regional. Desa-desa Contoh yang dikembangkan itulah yang merupakan model ekonomi Desa Pantai kelak di kemudian hari.

POKOK—POKOK KEBIJAKSANAAN

Adapun pokok-pokok kebijaksanaan yang perlu digariskan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut : Dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi maritim untuk pembangunan ekonomi daerah (area development) yang erat hubungannya dengan Hankamnas.

Perluasan konsepsi Bimas (atau semacam Bimas) yang memungkinkan nelayan dan petani kelapa, tambak, bebek dapat memiliki alat-alat produksi secara individuil (individual ownership), sedangkan sarana pelayanan yang diperlukan seperti sarana pengolahan, sarana transport dapat dimiliki secara kolektif. Dengan tersebarnya pemilikan individuil tersebut (dispersion of ownership), akan memudahkan perwujudan mekanisme koperatif. Kebijaksanaan program teknis yang akan dilakukan ialah berupa program mekanisasi dan bimbingan ke arah "*One Coordinated Operation*".

Dalam hubungan pembinaan keterpaduan bisnis (mikro) tersebut, dirasa perlu untuk menyelenggarakannya dengan sebuah wadah yang merupakan alat efektif untuk menggerakkan langkah pembangunan rakyat di kawasan pedesaan. Pembinaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan rakyat untuk dapat berdiri sendiri guna selanjutnya dihela dan diantarkan kejenjang bank-ability dengan dukungan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD). Untuk maksud itu pula, proyek-proyek terpadu yang menyinggung semua sektor ekonomi merupakan titik-tolak pengembangan kemampuan dan dinamika masyarakat desa. Proyek tersebut akan dikendalikan dengan sistem KUD ataupun Project Management Unit (PMU) seperti yang telah dikembangkan oleh Coconut Working Centre yang dipimpin oleh seorang manager dibantu oleh para ahli dari Universitas. Proyek-proyek tersebut akan menimbulkan self-helf (berdikari) rakyat kecil. Masyarakat tersebut dapat dirangsang dengan bantuan luar, seperti penyuluhan, bantuan teknis dan bantuan modal, baik dari Pemerintah Daerah, perbankan maupun luar negeri (Project-Aid). Agar kombinasi proyek-proyek tersebut

lebih efektif, maka fasilitas infrastruktur, feeder-roads dan tenaga listrik telah dipersiapkan.

Sebagai penguasa tunggal, Gubernur Kepala Daerah adalah administrator dalam arti kata luas, yakni Administrator Pemerintahan, Administrator Pembangunan dan Administrator masyarakat Daerah. Dalam masalah pembangunan ini ditekankan oleh Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA—I) bahwa inisiatif daerah diperlukan bahkan mutlak dikembangkan secara optimal. Dengan adanya pola rencana dan pola kegiatan dalam ruang lingkup Nasional dan Daerah, maka usaha-usaha dan kemampuan daerah akan dapat dikerahkan secara efektif dan saling menunjang, sehingga menjadi keseluruhan proyek itu konsisten.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagai agent of development, menganggap perlu untuk mengembangkan langsung pembangunan pedesaan pantai tersebut dalam rangka meng-efektifkan strategi ekonomi maritim untuk kepentingan pembangunan wilayah (regional planning) dengan mendorong kondisi stagnasi menuju self propelled growth. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah merasa berkewajiban untuk mengawasi pembinaan batas laut tertentu yang minimal merupakan kawasan perikanan rakyat (labour intensive fishery).

Pengaturan tata-guna tanah (land-use planning) perlu juga ditrapkan bagi kawasan pantai dengan coast-use planning, sehingga memudahkan Pemerintah Daerah untuk membina masyarakat pantai tersebut.

PERENCANAAN

Adapun titik sentral sasaran komponen Pembangunan Pedesaan Pantai ini adalah esensiil pemanfaatan hasil laut serta evaluasi andil lautan dalam pembinaan wilayah (coastal area development) kenelayanan (labour intensive fishery) sebagai karya pantai perlu dibina dan diarahkan andilnya dalam Pembangunan Daerah. Dengan adanya proyek tersebut dalam

ANALISA

satu lokalita desa, maka andil proyek ini terhadap area development dapat digambarkan sebagai berikut :

- I. Mobilisasi modal untuk dorongan investasi guna mewujudkan mekanisme ekonomi desa pantai.
- II. Hasil laut sebagai sumber devisa.
- III. Kesempatan kerja lewat pembangunan tim ekonomi rakyat (proyektuil).
- IV. Penggalian sumber-sumber baru pendapatan Kabupaten yang diperlukan untuk biaya pembangunan desa-desa.
- V. Sumber bahan makanan (protein).

Bertitik-tolak dari keadaan dan permasalahan di kawasan pedesaan pantai Sumatera Utara, maka oleh Pemerintah Daerah telah dirumuskan perencanaan yang serasi untuk menggerakkan potensi desa pantai dengan persiapan-persiapan yang sistematis dan kontinu. Semua rencana telah disusun dengan sebaik-baiknya, baik koordinasi pembangunan antar sektoral menuju integrated coastal development projects maupun kegiatan-kegiatan lintas sektoral seperti pembiayaan, penyediaan kesempatan kerja serta integrasinya dengan pembinaan kelompok ekonomi lemah sebagai pelaku dan penggerak ekonomi di lapangan dalam kerangka manifestasi mekanisme partisipasi masyarakat.

Dengan landasan yang kuat bagi mekarnya mekanisme ekonomi rakyat dengan dukungan kerangka konsepsi dan kebijaksanaan operasional, merupakan jaminan bahwa rakyat pantai akan hidup lebih sejahtera sebagai perwujudan cita-cita kita untuk menjadikan mereka manusia seutuhnya.

Adapun rencana jangka panjang adalah untuk meningkatkan daya mampu rakyat pantai untuk keluar dari keadaannya yang suram seperti sekarang ini, dan menghelanya masuk kedalam jalur ekonomi. Sedangkan rencana jangka pendek adalah menemukan model ekonomi desa pantai dengan program 3 (tiga) tahun.

POLA DASAR PEMBANGUNAN

Berdasarkan letak perairan Sumatera Utara, maka pedesaan pantai Sumatera Utara dapat dibagi atas 2 (dua) kawasan, yakni :

1. Kawasan Pantai Timur (Selat Malaka) yang meliputi : Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan dan Labuhan Batu.
2. Kawasan Pantai Barat (Samudera Indonesia) yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias.

Kedua kawasan pedesaan pantai di atas, pada umumnya mempunyai banyak persamaan dalam kegiatan ekonominya. Sampai sekarang kegiatan ekonomi yang menonjol adalah usaha perikanan rakyat, perkebunan kelapa, ternak bebek dan kerajinan rakyat; sedangkan pertambakan hanya mungkin di perairan Selat Malaka.

Setiap wilayah selalu mempunyai faktor-faktor pokok dan faktor pelancar yang merupakan potensi wilayah. Faktor-faktor pokok adalah potensi ekonomi ditambah dengan tersedianya tenaga kerja (manpower); sedangkan faktor pelancar adalah ketrampilan, sarana-sarana pemasaran dan komunikasi, sosial-budaya dan lain-lain. Potensi wilayah tersebut untuk dapat dikembangkan harus memperhatikan faktor penunjang dan faktor penghambat. Faktor penunjang tersebut merupakan masalah intern dan extern, demikian juga halnya terhadap faktor penghambat. Faktor penunjang yang bersifat intern adalah swadaya, swakarya dan swasembada, yang merupakan dana dan daya masyarakat dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi; sedangkan yang bersifat extern adalah adanya daya upaya (initial action) aparat Pemerintah seperti pembiayaan dan penyuluhan. Faktor penghambat yang bersifat intern adalah meliputi dana dan daya masyarakat ditambah sosial-budaya masyarakat; sedangkan faktor extern dapat merupakan kurangnya bimbingan terhadap masyarakat itu sendiri.

Di samping itu telah pula dilakukan seleksi pengembangan ekonomi wilayah pantai yang meliputi usaha-usaha primer

(perikanan dan pertanian), sekunder (pengolahan hasil primer) dan tertier (jalan-jalan dan pelengkap lainnya). Atas dasar seleksi tersebut, maka pada saat permulaan telah ditetapkan 7 (tujuh) pusat pengembangan dalam wilayah 7 (tujuh) Kabupaten pantai. Atas dasar penelitian-penelitian mikro ini disusunlah rencana pembangunan yang serasi dan mantap. Rencana ini diperlukan sebagai pedoman dasar dalam membina perimbangan pertumbuhan ekonomi desa pantai kelak pada tahapan selanjutnya. Pada tahun-tahun berikutnya diperlukan pula diversifikasi untuk dapat mengurangi resiko ketergantungan kehidupan mereka dari hasil laut saja. Secara skematis dapat dilihat dalam Skema pada halaman 605.

DASAR PENETAPAN PUSAT PENGEMBANGAN

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Sumatera Utara tanggal 17 Juli 1975 No. 463/IV/GSU untuk mempersiapkan dan melaksanakan Program 3 (Tiga) Tanun Pembangunan Desa Pantai tahun anggaran 1975/1978, maka Tim Desa Pantai telah melaksanakan persiapan pembangunan Desa Pantai Sumatera Utara dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut :

1. Meneliti masalah-masalah kehidupan rakyat pantai yang mempunyai nilai sosial yang berbeda dengan rakyat yang berdiam di kawasan pedesaan lainnya.
2. Meneliti Pusat Pengembangan di kawasan Pantai Selat Malaka dan Lautan Indonesia untuk dikembangkan sebagai *"MODEL"*.

Dalam implementasi rencana di atas, Pemerintah Daerah Sumatera Utara telah menetapkan 7 (tujuh) buan desa-pantai sebagai pusat pengembangan dalam 7 (tujuh) Kabupaten yang terdiri dari 4 desa di kawasan Pantai Timur dan 3 Desa Contoh di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara.

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Sumatera Utara untuk menetapkan masing-masing satu desa sebagai Growth Centre pada tujuh Kabupaten yang mempunyai kawasan pantai adalah

SKEMA POLA DASAR PEMBANGUNAN PEDESAAAN PANTAI — SUMATERA UTARA

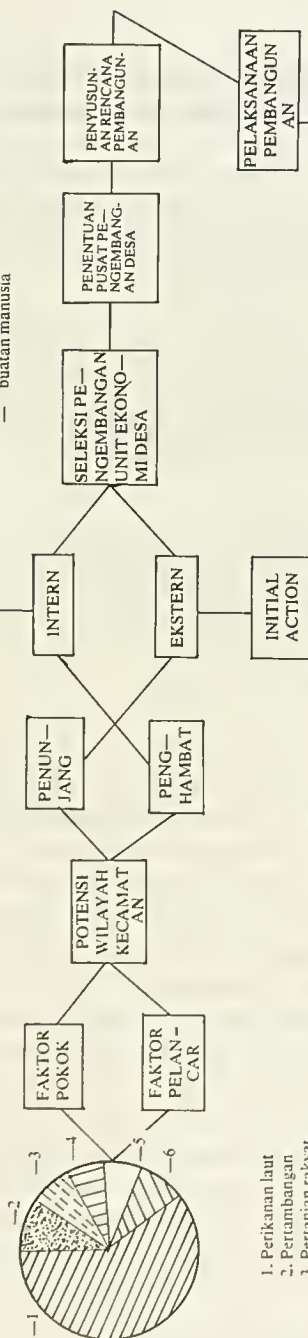
SWADAYA
SWAKARYA
SWASEMBADA

manusia & lingkungan
sebagai faktor dasar ekologi.

DANA DAN DAYA

— kualitas
— kuantitas
— alam
— buatan manusia

SKILL



Primair :

- Perikanan
- Pertanian

Secundair :

Pengolahan hasil primair

Section :

Jasa-jasa & pelengkap biaya meliputi :

- penelitian micro
- pengendalian
- koordinasi rencana

1. Perikanan laut
2. Pertambangan
3. Pertanian rakyat
4. Perkebunan rakyat
5. Perikanan
6. Industri kerajinan tangan



ANALISA

untuk mengembangkannya sebagai "MODEL" yang merupakan pusat pelayanan terhadap kawasan kecamatan.

Berbagai kriteria dipergunakan untuk menetapkan Growth Centre, antara lain potensi sosial-ekonomi, prasarana fisik dan-dinamika masyarakat. Adapun desa-desa contoh yang telah dipilih itu adalah sebagai berikut :

Selat Malaka :

1. Desa Bedagai, Tanjung Beringin — Deli Serdang.
2. Desa Bubun, Tanjung Pura — Langkat.
3. Desa Kampung Mesjid, Tanjung Tiram — Asahan.
4. Desa Labuhan Bilik, Panai Tengah — Labuhan Batu.

Pantai Barat :

1. Desa Pandan, Sibolga — Tapanuli Tengah.
2. Desa Natal, Natal — Tapanuli Selatan.
3. Desa Oloro, Gunung Sitoli — Nias.

PROGRAM PEMBANGUNAN

Program 3 (tiga) tahun ini secara keseluruhannya adalah berorientasi terhadap penyediaan kesempatan kerja secara sistematis. Seperti diketahui dalam G.B.H.N. tersimpul tiga tujuan strategis Pembangunan Nasional yakni peningkatan produksi/produktivitas, penciptaan kesempatan kerja dan penyebaran yang lebih merata dari penghasilan dan kemakmuran. Adapun konsekwensi daripada aspek-aspek strategis tersebut adalah bahwa peningkatan kesempatan kerja akan diintegrasikan dalam semua aspek pembangunan dan oleh karenanya penciptaan kesempatan kerja sebagai salah satu aspek strategis daripada pembangunan itu tidak saja dipandang sebagai suatu akibat dari adanya proyek-proyek pembangunan, melainkan sebagai suatu kegiatan yang secara sadar harus kita ciptakan melalui serangkaian kebijaksanaan-kebijaksanaan yang konsisten. Dari beberapa konsep tentang kriteria kesempatan kerja seperti investment/labor ratio dan lain sebagainya, maka konsep capital worker ratio memegang peranan penting.

Adapun program 3 tahun untuk Desa-desa Model tersebut telah dilakukan dengan bertitik-tolak dari :

1. Seminar Pembangunan Daerah di Berastagi tahun 1972.
2. Lokakarya Pembangunan Desa Pantai yang didukung oleh Gubernur Bank Indonesia dan Rektor USU tanggal 29 s/d 30 April 1974 di Medan.

Setelah dipersiapkan 7 (tujuh) Desa Contoh masing-masing satu lokasi di setiap Kabupaten kawasan pantai sebagai Pusat Pengembangan, maka disusunlah program sebagai berikut :

1. Menyiapkan prasarana, sarana ekonomi sosial dan Kantor Pusat Pengembangan.
2. Pengkajian proyek-proyek ekonomi rakyat (antar sektoral).
3. Membina proyek ekonomi rakyat sesuai dengan ayat 2, untuk diantarkan ke jenjang bank-ability dengan dukungan APBD. Semakin tinggi daya mampu menghisap kredit dari proyek-proyek rakyat itu, maka semakin banyak dana di luar APBD yang dapat ditarik masuk ke Propinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian terlihat bahwa pembinaan proyek ekonomi rakyat adalah merupakan "*Developmental Orientated Project*". Ketiga program tersebut di atas telah selesai dilaksanakan menurut jadwal waktunya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tiga Program Pembangunan Desa Pantai

Dalam implementasi Rencana Pembangunan Tiga Tahun Desa Pantai Sumatera Utara telah ditetapkan tiga program yang meliputi :

1. *Pembangunan prasarana ekonomi sosial dan proyek kesejahteraan rakyat*

Prasarana dan sarana ekonomi sosial yang dibangun adalah sebagai unsur penunjang, yang memberikan sumbangan langsung terhadap pembangunan berbagai sub-sektor ekonomi. Penyediaan prasarana dan sarana ini adalah untuk mempersiapkan desa Pusat Pengembangan menjadi pusat pelayanan atau service-centre. Dengan kata lain bahwa menjelang kesebelasan ekonomi rakyat mulai bermain, maka stadionnya harus dipersiapkan lebih dahulu. Pembangunan prasarana

ekonomi sosial dan kesejahteraan rakyat mencakup bidang-bidang :

- Perencanaan desa, yaitu pengaturan tata-pisik desa, tata ekonomi dan tata-sosial yang merupakan tata desa contoh yang ideal.
- Perencanaan Ekonomi : Perencanaan ekonomi desa secara menyeluruh termasuk di dalamnya aspek pemasaran dan pusat-pusat pengumpulan komoditi serta jaringan transport.
- Potensi Desa : Inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh potensi desa telah dipersiapkan seperti penyediaan dan penyajian data-data yang aktuil mengenai potensi desa contoh secara menyeluruh, baik secara kuantitatif maupun kualitatif disertai dengan pemetaan ekonomi.

Adapun proyek-proyek pisik yang dibangun dengan anggaran tahun 1975/1978 sebesar Rp. 304 juta adalah sebagai berikut :

a. *Markas* sebagai pos komando yang dikendalikan oleh seorang sarjana agar mampu menterjemahkan konsepsi ke dalam operasionilnya.

b. *Prasarana dan sarana sosial-ekonomi*, seperti :

- Puskesmas
- Rehabilitasi S.D.
- Balai Desa
- Pesantren
 - Sarana transport
- Sarana kesenian
- Steiger
- Sumur bor untuk air minum
- Prasarana jalan penghubung ke pusat pengembangan
- Generating set
- Puskesmas terapung (boat)
- Ferry boat.

c. *Demonstration-Plot* pertambakan, ternak itik (bebek) dan pembibitan kelapa. Proyek ini menjadi contoh untuk dikaji oleh rakyat.

2. *Perpaduan proyek antar sektoral*

Tujuan utama program pembangunan desa pantai Sumatera Utara adalah untuk mematangkan pembangunan antar sektoral dengan paduan proyek (coastal development projects) sekaligus dengan pembinaan para pelaku ekonomi lapangan sebagai mata tombak pembangunan. Dengan terciptanya proyek-proyek terpadu tersebut, maka dapatlah diharapkan bereaksinya mekanisme ekonomi Desa Pantai menuju akselerasi ekonomi wilayah Kecamatan yang pada gilirannya pula akan membenihkan andil konkrit terhadap akselerasi ekonomi regional. Untuk maksud itu maka telah dipersiapkan 4 (empat) usulan proyek yakni proyek perikanan rakyat, pertambakan, perkebunan kelapa rakyat dan peternakan itik (bebek). keempat proyek itu akan dibangun di semua desa contoh dan investasi proyek-proyek itu kelak akan mampu menggerakkan mobilitas modal dalam lokalitas Desa Contoh. Dengan bantuan 2 (dua) tenaga ahli dari US—AID yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara tahun 1976 telah diselesaikan suatu studi yang mendalam terhadap proyek-proyek sub-sub sektor ekonomi berdasarkan skala prioritas dalam usulan Proyek Repelita III. Analisa tersebut meliputi Feasibility Study dan Evaluasi Proyek dari sub-sub sektor yang terdapat di kawasan Desa Contoh. Masing-masing sub-sektor telah dianalisa secara kuantitatif, baik dari segi ekonomis maupun finansial. Di lain pihak studi ini merupakan list of investment opportunities untuk memudahkan dunia perbankan dan lembaga keuangan internasional dalam memberikan bantuannya baik berupa project-aid, grant, asistensi ahli-ahlinya, soft loan dan lain-lain, sehingga diharapkan Daerah Sumatera Utara akan dapat meningkatkan absorptive-capacity rakyatnya terhadap dana-dana perkreditan. Kemampuan hisap kredit inilah pada hakekatnya mencerminkan dampak positif pembangunan segala fasilitas prasarana. Untuk tujuan itu maka dana APBD telah disisihkan sebesar Rp. 304 juta untuk menunjang program 3 (tiga) tahun dengan titik berat fasilitas prasarana sosial-ekonomi, proyek contoh (demonstration plot) pertambakan, bebek, bibit kelapa dan Markas. Bila model ekonomi desa pantai ini dapat disusun dengan baik, maka pengembangan selanjutnya sudah dapat diharapkan dengan bantuan luar negeri.

Adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengantar mereka ke jenjang kehidupan yang lebih baik yang tentunya dengan pelayanan pengelolaan bisnis KUD dengan dukungan APBD. Atas dasar inilah Pemerintah Daerah ingin meyakinkan dunia perbankan dan lembaga finansial lainnya, bahwa partisipasi Pemerintah Daerah jelas konkrit dalam mempersiapkan lapangan permainan (stadion) dan giliran dunia perbankan pula untuk menyediakan andil mereka berupa capital-input untuk mengantarkan kesebelasan rakyat kecil tersebut ke jenjang bank-ability. Bila mereka telah bankable, maka mekanisme pembiayaan telah mulai bergerak.

3. Pembinaan kesebelasan ekonomi rakyat (Golongan Ekonomi Lemah).

Dalam implementasi program pembangunan Desa Pantai, pembinaan masyarakat pantai khususnya pemain ekonomi lapangan (wiraswasta) adalah merupakan langkah pertama yang harus dikerjakan. Mereka itulah yang justru bergerak di lapangan yang memerlukan bimbingan untuk diantar ke jenjang bank-ability. Pembinaan para golongan ekonomi lemah ini akan dilaksanakan dalam wadah KUD. Seperti diketahui bahwa sudah merupakan konsensus nasional, bahwa pembinaan para golongan ekonomi lemah di pedesaan adalah melalui KUD/Inpres 2/78, yang pada gilirannya akan mengantar kelompok-kelompok kecil ke jenjang bank-ability. Pada hakekatnya, KUD akan melaksanakan fungsi katalisator dengan pelayanan pengelolaan kelompok-kelompok kecil (Business Management Service). Pemerintah Daerah akan membiayai management KUD tersebut sebagai partisipasi aktif untuk membantu dunia perbankan yang menyediakan dana kredit usaha rakyat kecil (KIK—KMKP).

Landasan konsepsional Pembangunan Desa Pantai melalui pendekatan kemakmuran dan keamanan adalah dimaksudkan agar pembangunan perikanan rakyat khususnya nelayan tradisional sebagai profesi utama rakyat pantai, jelas kaitannya dengan kepentingan regional dan nasional.

Dalam pola operasionalnya, Pemerintah Daerah menyusun kesebelasan ekonomi rakyat tersebut untuk diantar ke jenjang bank-ability. Dukungan Pemerintah Daerah tersebut telah meyakinkan Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat khususnya Bappenas dengan menyalurkan bantuan luar negeri. Strategi ini ternyata membuahkan hasil yang cukup memuaskan, yakni setelah tiga tahun program berjalan yang dipusatkan terhadap penyiapan lapangan permainan yang konsepsional di 7 (tujuh) Pusat Desa Contoh, maka akhirnya Bank Indonesia menyediakan dana Rp. 240 juta untuk kredit proyek-proyek ekonomi rakyat. Di samping itu Bappenas bekerjasama dengan Dirjen PUOD telah mencantumkan bantuan luar negeri dalam Blue-Book untuk Program Desa Pantai selama Repelita III khusus untuk tujuh Pusat Desa Contoh sebesar US \$ 4 juta dan Departemen Dalam Negeri menyediakan dana sebagai counterfund sebesar US \$ 2 juta, sehingga keseluruhannya berjumlah US \$ 6 juta atau — Rp. 2,4 milyar. Proyek ini merupakan program regional Propinsi Sumatera Utara yang pertama mendapat bantuan luar negeri.

Dana tersebut telah dipancing dengan dana APBD sebesar Rp. 304 juta selama 3 tahun program ini berlangsung. Di sini terlihat bahwa program inti untuk mengembangkan daya mampu ekonomi rakyat desa pantai agar dihela dan diantarkan ke jenjang bank-ability baru menjadi kenyataan pada saat berakhirnya program 3 tahun berupa realisasi kredit Bank Indonesia sebesar Rp. 240 juta dengan tahap pertama sebesar — Rp. 91.350.000,— yang akan disalurkan bulan Juli ini lewat Bank Pembangunan Daerah.

Persetujuan Bank Indonesia tersebut di atas didasarkan atas pengkajian proyek-proyek ekonomi rakyat seperti diuraikan dalam ayat 2 dan laporan Tim PT. Askrido yang telah mengunjungi lapangan dalam bulan Juni 1977. Program inilah yang justru dinanti-nantikan yang justru baru mulai beraksi bulan Juli ini.

ANDIL PEMBANGUNAN PERIKANAN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA PANTAI

Tujuan dari pembangunan Desa Pantai dengan melibatkan hasil laut dan nelayannya adalah untuk mengembangkan manfaat ekonomi terhadap masyarakat dalam rangka pembangunan ekonomi regional dan nasional.

Dalam memilih beberapa kemungkinan pengembangan usaha kenelayanan ataupun perikanan, maka kriteria utama yang perlu diperhatikan ialah pengembalian modal yang ditanam baik dari sudut pandangan mikro maupun makro dan bukan bertitik-tolak dari sudut pengembangan teknologi lanjutan.

1. Ekonomi Perikanan

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan pedesaan pantai ini tentu diperlukan suatu pola rencana yang tepat sehingga jelas terlihat perkembangan potensi ekonomi maritim yang dikaitkan dengan Regional Development. Dengan dihelanya kegiatan ekonomi kenelayanan (unbalanced growth), maka kehidupan bidang ekonomi rakyat lainnya seperti pertanian, peternakan, perkebunan rakyat (kelapa) yang terdapat di sepanjang pantai akan ikut terdorong.

Modernisasi yang dimaksud ialah pentrapan teknologi konsisten dengan pendekatan employment approach sebagai prioritas area development. Dengan tercapainya kegiatan ekonomi di pedesaan pantai tersebut, maka sasaran pembangunan akan dapat dicapai.

Kenelayanan adalah kegiatan ekonomi yang analog dengan ekonomi pertanian (Fishery has been an economic activity analogous to peasant agriculture-Phraseology of the indicative word Plan F.A.O. 1969). Oleh karena itu maka perlu direncanakan sasaran-sasaran pembangunan sehingga kaitan lautan dengan area-development dapat jelas kelihatan.

1.1. Area-development approach sebagai objective utama dan sasaran-sasaran yang tercakup dalam area development :

- a. Perluasan pemilikan alat-alat produksi (dispersion of ownership).
- b. Peningkatan produktivitas kegiatan kenelayanan.
- c. Peningkatan tingkat hidup masyarakat dalam proyek area.
- d. Perbaikan saluran tata-niaga.
- e. Perbaikan ketrampilan dan peningkatan keahlian nelayan.
- f. Pengembangan potensi ekonomi komplementer kenelayanan seperti peternakan dan pertanian rakyat.
- g. Pengembangan sumber-sumber baru.

1.2. *Manpower Planning*

Lapangan kerja keahlian sangat luas dalam kegiatan hasil laut untuk manpower-planning dalam akselerasi modernisasi Pembangunan Nasional 25 tahun.

Di bawah ini disusun pembidangan lapangan kerja yang luas itu :

— Ahli biologi	— Konsultan keuangan
— Ahli teknologi perikanan	— Konsultan marketing
— Ahli teknik	— Ahli mekanik
— Arsitek perkapalan	— Ahli elektronika
— Ahli ekonomi perikanan	— Masinis
— Ahli bangunan perkapalan	— Nakhoda
— Ahli trawl	— Ahli peralatan alat-alat besar
— Ahli pukut langgar	— Ahli statistik
— Ahli pancing	— Konsultan pembiakan
— Ahli jaring	— Ahli listrik
— Ahli tuna	— Ahli pertukangan kayu
— Ahli pengolahan	— Ahli galangan kapal
— Ahli las kapal	— Pembantu laboratorium.

Mengirim pelajar ke luar negeri dalam bidang-bidang tersebut di atas belum memberikan hasil konkrit oleh karena kita belum memiliki kapal-kapal modern untuk menyalurkan mereka. Karenanya manpower-planning dalam hasil laut hanya dapat berhasil bila kita mulai sendiri dari bawah dengan up-grading alat-alat tradisional rakyat.

1.3. *Peningkatan Produktivitas Kenelayanan*

Peningkatan produktivitas alat-alat tradisional kenelayanan seperti motorisasi perahu dan introduksi alat-alat penangkapan yang baru baik bahannya maupun design. Kebijakan seperti ini dapat dengan cepat membawakan kesejahteraan materiil nelayan dan dapat pula mendorong ataupun merupakan bagian dari proses pembangunan. Oleh karenanya maka pembinaan proyek-proyek seperti itu punya kaitan langsung dengan pola Pembangunan Regional. Adapun andilnya dalam area-development dapat diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 1

ILLUSTRASI HIPOTESIS, PROYEK PERIKANAN RAKYAT (LABOUR INTENSIVE FISHERY)

Sumber Modal	Penggunaan Modal	Sumber dan penggunaan tenaga kerja :	Andilnya dalam Area Development
1. Badan-badan Internasional	1. Impor barang-barang modal seperti mesin-mesin dll.	1. Ketrampilan tenaga kerja lokal dalam masalah transport pabrik-pabrik Eshandling di Pusat Pasar.	1. Meningkatkan produktivitas marginal tenaga kerja sehingga menyebabkan adanya peningkatan upah. Kenaikan upah akan meningkatkan permintaan terhadap barang.
2. Dalam negeri : —Alokasi dana pembangunan AP-BD —Kredit perbankan	2. Pembangunan : —Pabrik Es —Transport —Storage dan fasilitas handling di Pusat Pasar	2. Pengembangan ketrampilan teknis mesin, reparasi dan perawatan boat sehingga prinsip tambahan tenaga kerja dalam bidang kenelayanan dalam masa berikutnya mereka hanya yang sudah terlatih dan dengan sendirinya tercipta ketrampilan untuk dapat memenuhi tuntutan pembangunan pengembangan teknologi konsisten.	2. Perluasan pasar dan program mekanisasi yang juga berarti adanya peningkatan kemakmuran rakyat yang berdiam dalam suatu lokalita yang pada gilirannya akan memerlukan arus permodalan metode dan teknik baru dalam pembiayaan.
3. Dana Swasta	3. Latihan nelayan agar bekerja efisien, reparasi peralatan serta perawatan.		3. Pasar barang-barang konsumsi akan meluas. 4. Retribusi Daerah dapat lebih digerakkan dengan berkembangnya kegiatan-kegiatan tersebut, baik dalam kawasan proyek maupun di pasar-pasar penjualan seperti pengecer.

1.4. Pengembangan enclave dengan modal besar, teknologi dan perluasan pasar

Pembangunan enclave ini bisa dilakukan dengan joint-venture ataupun melalui konsesi (concessi arrangement) kepada asing. Jalan manapun yang ditempuh, namun bagi daerah dianggap cukup memadai dengan hanya menyediakan tanah untuk processing-plant. Jika melalui konsesi pengolahan lautan yang diberikan, maka praktis tidak ada fasilitas yang harus disediakan. Laba yang diperoleh mungkin saja sebanding dengan apa yang telah diandalkan. Laba dapat diterima dalam bentuk sewa dan pajak, lapangan kerja, latihan-latihan praktis bagi rakyat setempat bila kegiatan joint-venture itu berbentuk aktivitas processing di darat (shore based activity).

1.5. Perusahaan patungan

Modal asing sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 memang terasa positif andilnya dalam Pembangunan Nasional, tetapi khusus dalam hubungannya dengan pedesaan pantai Sumatera Utara kiranya modal asing tersebut tidak berwujud joint-venture penangkapan ikan, tetapi sebaiknya joint venture diarahkan dalam kegiatan processing di darat (shore based processing plant), khususnya pantai Barat Lautan Hindia sehingga Sibolga dapat menjelma menjadi fishing-harbour. Berorientasi terhadap kepentingan pembinaan wilayah, kiranya cukup besar manfaatnya bila mereka menggunakan mesin-mesin diesel dan peralatan penangkapan untuk rakyat nelayan dengan casco (badan boat) dibuat dalam negeri sehingga asas akselerasi akan sudah dapat terlihat dengan adanya boat-building proyek disamping fungsinya sebagai penyedot tenaga kerja. Dengan membangun sarana produksi seperti kamar pendingin di pantai, manufacturing industry (processing), research & survey maka kesemuanya itu kelak menjadi prasarana Pembangunan Pedesaan Pantai yang langsung dimiliki oleh rakyat banyak.

Adapun manfaat modal besar perikanan terhadap kawasan pedalaman, dapat digambarkan dengan Tabel 2; sedangkan Diagram 1 memperlihatkan lalu-lintas uang dari kegiatan tersebut.

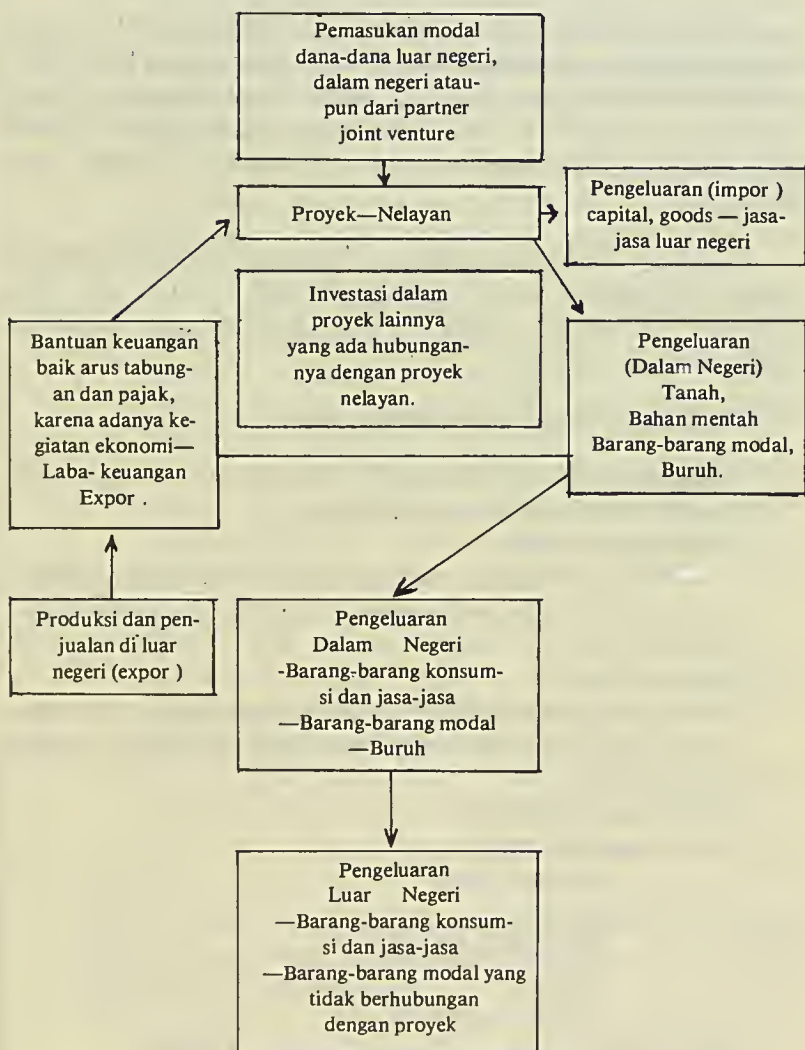
Tabel 2

ILLUSTRASI CAPITAL INTENSIVE FISHERY.

Sumber modal	Penggunaan modal	Sumber dan penggunaan buruh
1. Bantuan Luar Negeri	1. Pembelian peralatan (impor)	Staf ahli baik dari partner joint-venture ataupun dari PBB.
2. Joint venture	2. Bangunan :	Tenaga terlatih dan setengah terlatih.
3. Andil Daerah berupa lokasi untuk pelabuhan dan processing plant	a. Lock, peralatan untuk loading (muat)	Latihan atau up-grading tenaga lokal oleh luar negeri.
	b. Fish-meal storage	Tenaga lokal yang bekerja di kapal dock, processing plant dan perawatan.
	c. Infrastruktur : —perumahan —listrik —air minum —jasa-jasa	Implikasi ekonomi terhadap areal development atau region. 1. Produktivitas marginal tenaga lokal meningkat melampaui rata-rata produktivitas nasional. Kenaikan upah karena adanya kenaikan produktivitas akan meningkatkan pengeluaran untuk barang-barang konsumsi dan tabungan. 2. Hal ini akan memperluas barang-barang konsumsi pasar lokal. 3. Semakin besarnya arus tabungan, baik karena inisiatif pribadi kebijaksanaan pemerintah lewat pungutan pajak, akan memperbesar dana untuk investasi. 4. Up-grading tenaga terlatih semakin meningkat. 5. Devisa untuk pemerintah semakin meningkat adalah sebagai akibat meningkatnya volume ekspor . 6. Hasil pajak (pemerintah) dapat dipergunakan antara lain : a. Membangun development-project b. Investasi dalam management stock hasil laut c. Mendorong kegiatan ekonomi lainnya yang pada gilirannya akan menghasilkan pendapatan pemerintah lewat perpa-jakan. 7. Hak atas pemilikan atas barang-barang modal di darat maupun kapal-kapal yang berada di laut. 8. Ketrampilan dan pengalaman akan diperoleh baik bagi pemerintah maupun untuk angkatan tenaga kerja untuk kemungkinan pembangunan dan pengembangan kegiatan ekonomi nelayan lainnya.

Diagram 1 :

Diagram arus uang dari Capital Intensive Fishery.



SUMBER : A Plan for Fishery Development (Indian Ocean Program)
Indian Ocean Fishery Commission F.A.O. 1971 ROME

2. Pola Pembiayaan

Dalam pelaksanaan program pembangunan Perikanan Rakyat yang konsepsional dalam Pola Pembangunan Desa Pantai, pembiayaan merupakan salah satu masalah yang memerlukan pemikiran dan perencanaan yang matang karena faktor ini sangat menentukan bagi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Mengingat bahwa feasible projects akan pasti menemukan sumber pembiayaan seperti halnya dengan motto "The Flag Follows The Trade", maka project proposal dan feasibility studies telah dipersiapkan.

2.1 Penggunaan dan sumber-sumber dana

Penggunaan dan sumber-sumber dana untuk pembangunan *Proyek Model* adalah sebagai berikut :

a. Penggunaan dana

Untuk membangun prasarana sosial-ekonomi dan sarana-sarana lainnya seperti steiger, sumur bor, coolroom dan lain-lainnya.

b. Sumber dana

Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan prasarana sosial-ekonomi dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain :

b.1. Dana Kabupaten

b.2. Dana Kabupaten :

- Bantuan Desa
- Inpres
- Retribusi hasil laut
- Ipeda
- APBD Daerah Tk. II.

b.3. APBD Tingkat I Propinsi Sumatera Utara

b.4. Dana APBN melalui Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian.

c. Kebutuhan dana investasi untuk peralatan perikanan seperti perahu bermotor, boat, alat-alat penangkapan ikan dan sarana-sarana produksi lainnya dapat diperoleh dari lembaga-lembaga sebagai berikut :

c.1. Perbankan :

Kredit Massal "KIK" (Kredit Investasi Kecil) dan *"KMKP"* (Kredit Modal Kerja Permanen) yang secara lengkap telah disampaikan kepada Bank Indonesia setelah identitas proyek dan feasibility studies dipergunakan.

c.2. Kelompok BUUD/KUD akan dijamin oleh LJKK (Lembaga Jaminan Kredit Koperasi).

c.3. Kelompok nelayan pemilik (pengusaha kecil) akan dijamin oleh PT Askrindo.

c.4. PT Bahana yang didirikan oleh pemerintah terutama dimaksudkan untuk mengembangkan perusahaan golongan ekonomi lemah dalam bentuk antara lain penyertaan modal atas dasar equity financing dan pembinaan perusahaan.

c.5. PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (PT UPINDO/IBPC), dalam kegiatannya dapat pula menyediakan dana untuk pendirian dan pengembangan perusahaan golongan ekonomi lemah.

c.6. Project Aid :

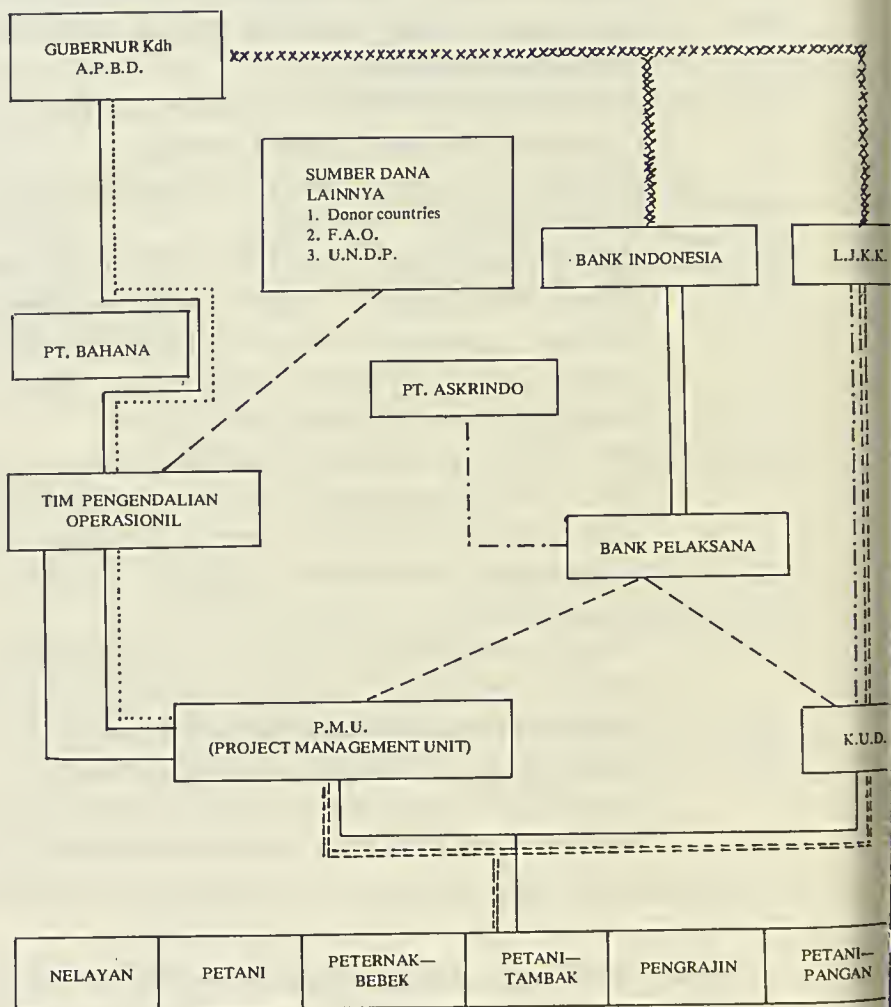
Project Aid dari luar negeri khususnya UNDP/FAO dapat memberikan bantuan dana dan tenaga ahli seperti yang pernah diperoleh oleh proyek Perikanan Rakyat di Sri Lanka dan Kerala di India.

Untuk lebih jelasnya arus penggunaan dan sumber-sumber dana digambarkan dalam Bagan berikut.

2.2. *Pembebasan Bea Masuk, PPn Impor dan MPO Impor*

Untuk mendorong pengembangan perikanan rakyat perlu diberikan perangsang dalam bentuk pembebasan Bea Masuk PPn Impor dan MPO Impor.

BAGAN
ARUS PENGGUNAAN SUMBER DANA "PROYEK MODEL"
(KELOMPOK PENGUSAHA KECIL DALAM KUD/PMU)



KETERANGAN :

- = Arus pembiayaan
- = Arus pembinaan
- - - - - = Garis jaminan
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx = Garis koordinasi

3. Kelanjutan Program 3 (tiga) Tahun Tahap II

Sesuai dengan jadwal program ini 3 (tiga) tahun dari 1 April 1975 s/d 31 Maret 1978, maka organisasi extra struktural yang telah dibentuk pada Tingkat I dan II telah dibubarkan.

Gubernur Bank Indonesia telah mendesak Pemda Sumatera Utara agar Tim Desa Pantai terus bertugas sebagai pembina semua proyek yang telah mereka biayai bersama-sama dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU).

Sehubungan dengan itu, maka program Desa Pantai tahap II diteruskan dengan perombakan struktur organisasi guna menghindarkan jaringan birokrasi yang berbelit-belit seperti seringnya pimpinan proyek berganti. Tim Desa Pantai dengan beranggotakan Dinas-dinas yang bersangkutan ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek yang langsung membawahi 7 (tujuh) General Manager yang diawasi dan dibina oleh Camat dan atas nama Bupati. Sedangkan Bupati Kdh Tingkat II diharapkan meneruskan pembinaan Pusat-pusat Pengembangan Kecamatan pantai lainnya secara serentak berdasarkan kerangka konsepsi dan kebijaksanaan operasional yang telah dirumuskan selama 3 (tiga) tahun yang lalu serta yang telah memperlihatkan hasil yang cukup cerah.

Mulai tanggal 1 Agustus 1978, proyek ekonomi rakyat mulai bergerak dengan biaya tahap I sebagai berikut :

Pantai Timur :

1) Bubun (Langkat) 25 pukat	Rp. 6.250.000,—
2) Bedagai (Deli Serdang) 10 pukat	Rp. 8.350.000,—
3) Tanjung Tiram (Asahan) 10 pukat	Rp. 8.350.000,—
4) Labuhan Bilik (Labuhan Batu) 25 pukat	Rp. 6.250.000,—
Total	<u>Rp. 29.200.000,—</u>

Pantai Barat :

1) Natal (Tapanuli Selatan) 5 pukat	Rp. 15.000.000,—
1 Truk	Rp. 5.000.000,—
1 Pabrik Es 2 ton/hari	<u>Rp. 15.000.000,—</u>
	Rp. 35.000.000,—

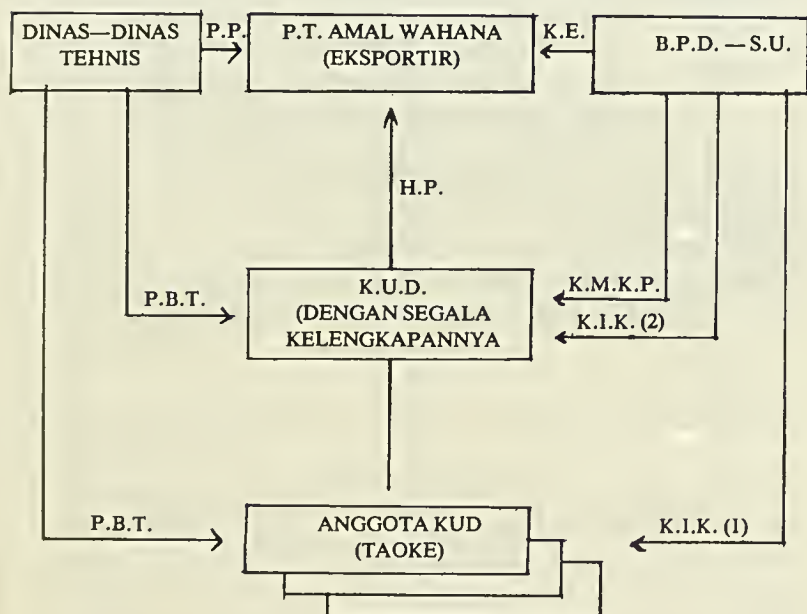
ANALISA

2) Pandan (Tapanuli Tengah) 5 pukat	Rp. 15.000.000,—
1 Truk	Rp. 5.000.000,—
	<hr/> Rp. 20.000.000,—
3) Oloro (Nias) 20 pukat	Rp. 7.150.000,—
Total	<hr/> Rp. 91.350.000,— <hr/>

3.1. *Penetapan Pola Pengorganisasian Armada Nelayan sebagai proyek pertama Desa Pantai Propinsi Sumatera Utara*

Agar supaya usaha pengembangan desa pantai tersebut berhasil, telah disepakati perlunya mengorganisir para armada nelayan di dalam suatu wadah usaha bersama dalam rangka memperlancar penyaluran sarana produksi, pemasaran dan pengawasan. Telah disepakati oleh Bank Indonesia, PT Askrido, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Tim Desa Pantai Sumatera Utara untuk menggunakan dua wadah usaha, yaitu BUUD/KUD dan wadah usaha pra-koperasi dengan bentuk P M U (Project Management Unit). Berkenaan dengan adanya Inpres No. 2/1978 menyangkut BUUD/KUD, maka wadah usaha BUUD yang sekarang telah ada di daerah pusat pengembangan akan disesuaikan dan disempurnakan agar BUUD/KUD yang bersangkutan secara struktural sudah sesuai dengan Inpres No. 2/78 dan sudah siap berfungsi sebagai wadah usaha bersama dalam rangka pengembangan Desa Pantai. Untuk keperluan penyesuaian dan penyempurnaan tersebut peranan Dinas Koperasi Propinsi sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu penyempurnaan BUUD/KUD tersebut telah disepakati untuk dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. Dengan memperhatikan Inpres No. 2/78 maka Diagram Organisasi Nelayan dan hubungannya dengan Lembaga Keuangan/Bank Pembiaya dan PT Askrido dicantumkan pada Diagram halaman 623. Pengorganisasian Nelayan di daerah yang belum ada BUUD/KUD akan dilaksanakan secara Pra-Koperasi dengan memakai bentuk Project Management Unit (P.M.U.). Diagram Organisasi Nelayan dan hubungannya dengan instansi dan lembaga-lembaga lain tergambar pada Diagram halaman 624.

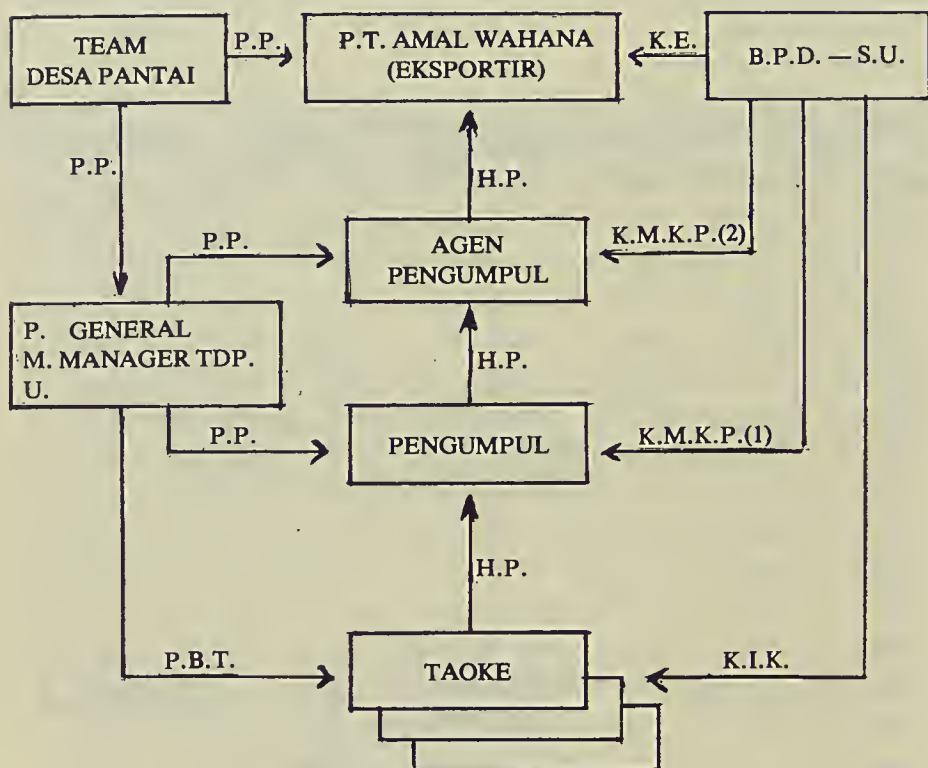
**DIAGRAM HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA
BUUD/KUD SEBAGAI PUSAT PELAYANAN KEGIATAN PEREKONOMIAN
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DESA PANTAI DI SUMATERA UTARA**



Keterangan :

1. K.I.K. (1) = Kredit untuk pengadaan sarana usaha dari Bank untuk para Taoke anggota K.U.D.
2. K.I.K. (2) = Kredit untuk pengadaan sarana usaha (jika diperlukan) dari Bank untuk K.U.D.
3. K.M.K.P. = Kredit Modal Kerja (jika diperlukan) dari Bank untuk K.U.D.
4. K.E. = Kredit Ekspor (jika diperlukan) dari Bank untuk P.T. AMAL WAHANA.
5. P.P. = Petunjuk dan Pengarahan dari Dinas Tehnis untuk eksportir.
6. P.B.T. = Petunjuk dan Bimbingan Tehnis dari Dinas-dinas Tehnis kepada K.U.D. dan untuk anggota K.U.D./Taoke.
7. H.P. = Hubungan pemasaran antara K.U.D. dengan eksportir.

**DIAGRAM HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN DESA PANTAI DI SUMATERA UTARA**



Keterangan :

1. K.I.K. = Kredit untuk pengadaan sarana usaha dari Bank untuk Taoke.
2. K.M.K.P. (1) = Kredit Modal Kerja (jika diperlukan) dari Bank untuk para pedagang pengumpul di pantai.
3. K.M.K.P. (2) = Kredit Modal Kerja (jika diperlukan) dari Bank untuk Agen Pengumpul di Kota.
4. H.P. = Hubungan Pemasaran
5. P.P. = Petunjuk dan Pengarahan
6. K.E. = Kredit Ekspor dari Bank untuk eksportir.
7. P.B.T. = Petunjuk dan Bimbingan Tehnis dari General Manager Tim Desa Pantai untuk para Taoke.

3.2. *Penetapan Organisasi Armada Nelayan di Desa Contoh (Pusat Pengembangan)*

Dengan memperhatikan kesiapan organisasi di daerah/desa pusat pengembangan, telah disepakati bahwa organisasi BUUD/KUD akan dipergunakan untuk :

- 1) Desa Bedagai, Kabupaten Deli Serdang;
- 2) Desa Bubun, Kabupaten Langkat;
- 3) Desa Kampung Mesjid, Kabupaten Asahan;
- 4) Desa Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Untuk daerah-daerah lain, yaitu Desa Labuhan Bilik/Kabupaten Labuhan Batu, Desa Natal/Kabupaten Tapanuli Selatan dan Desa Oloro/Kabupaten Nias, akan dipergunakan organisasi Project Management Unit (P M U) karena ketiga daerah tersebut pada waktu ini belum ada BUUD/KUD.

3.3. *Persiapan Pembentukan Organisasi Nelayan di Pusat Desa Pengembangan*

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Organisasi Nelayan untuk setiap Pusat Desa Pengembangan sebagaimana tersebut pada titik 3.2. di atas, maka kepada Tim Desa Pantai, Dinas Koperasi dan Pemerintah Daerah setempat telah mematangkan persiapan dan pembentukan Organisasi Nelayan yang telah ditetapkan tersebut. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara telah mempersiapkan penyebaran kredit untuk pengembangan Desa Pantai sebagaimana telah disetujui oleh Bank Indonesia dan PT Askrindo.

3.4. *Penetapan Sarana Kerja Armada Nelayan*

Dari pembicaraan di dalam pertemuan terakhir ternyata masih adanya kurang-pengertian mengenai paket kredit. Berkenaan dengan itu maka telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan satu paket kredit adalah keperluan kredit untuk satu unit usaha nelayan. Misalnya di satu daerah menurut pertimbangan Tim Desa Pantai unit-unit nelayan

hanya memerlukan jaring, maka satu paket adalah harga jaring itu saja. Di daerah lain unit-unit nelayan memerlukan jaring dan mesin, maka paket kredit berupa kredit untuk pembiayaan jaring dan mesin. Demikian juga jika ada yang memerlukan jaring, mesin dan kapal, maka satu paket adalah harga jaring, mesin dan kapal. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Tim Desa Pantai telah menyusun besarnya paket kredit untuk setiap unit nelayan dan menetapkan besarnya paket kredit diperlukan. Telah pula ditegaskan bahwa PT Askrindo telah menyetujui jumlah paket untuk setiap daerah sebagaimana tersebut pada telex PT ASKRINDO No. 59/MT/DIR/II/1978 tertanggal 22 Pebruari 1978, yaitu :

- 1) Daerah Bubun sebanyak 25 paket;
- 2) Daerah Bedagai sebanyak 10 paket;
- 3) Daerah Kampung Mesjid, Tanjung Tiram sebanyak 10 paket.
- 4) Daerah Labuhan Bilik sebanyak 25 paket;
- 5) Daerah Pandan sebanyak 5 paket;
- 6) Daerah Natal sebanyak 5 paket;
- 7) Daerah Oloro sebanyak 20 paket.

3.5. *Masalah Sarana Penunjang*

Sarana penunjang yang diperlukan dalam rangka pengembangan desa pantai adalah truk untuk pengangkutan hasil maupun bahan penolong (es) dan ice making plant. Mengenai keperluan truk sebagai sarana penunjang ditegaskan bahwa PT. ASKRINDO pada prinsipnya telah menyetujui penutupan pertanggungan atas kredit untuk penyediaan sarana penunjang tersebut, namun perlu sekali oleh Team Desa Pantai ditetapkan jenis truk, merek truk dan harga on the road. Disamping itu perlu pula ditetapkan organisasi atau badan usaha apa yang akan mengelola sarana truk tersebut. Untuk keperluan itu, Team Desa Pantai telah mengajukan masalah tersebut kepada B.P.D. Sumatera Utara dan selanjutnya B.P.D. Sumatera Utara mengajukan kepada PT. ASKRINDO. Adapun Desa yang mengajukan permohonan truk adalah Desa Natal dan Desa Pandan dimana di kedua desa

tersebut telah ada BUUD—nya, maka diproyeksikan bahwa kredit untuk penyediaan truk tersebut disediakan untuk BUUD/KUD yang telah disempurnakan. Demikian pula sarana truk yang diperlukan di pantai Timur, yaitu Desa Labuhan Bilik dimana belum ada BUUD/KUD, maka pengelolaan truk di desa ini akan diproyeksikan untuk pengusaha pribumi yang bonafide. Untuk ini Team Desa Pantai bersama dengan Pemerintah Daerah setempat akan memilih pengusaha yang bersangkutan dan mempersiapkannya untuk ikut-serta didalam program pengembangan Desa Pantai. Adapun sarana penunjang lainnya adalah Ice Making Palnt. Untuk penyediaan Ice Making Plant di daerah Natal, telah sepakati untuk mencari satu pengusaha pribumi untuk ditunjuk menjadi pengelola Ice Making Palnt tersebut. Untuk keperluan ini Team Desa Pantai, Pemerintah Daerah setempat dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara masih akan menyusun Feasibility study dan mengusulkannya. Ice Making Plant di daerah Natal dianggap perlu mengingat supply es untuk keperluan perikanan ini hanya dapat disupply dari Sibolga yang jaraknya 200 Km. Oleh karena itu di daerah Natal dianggap perlu memiliki Ice Making Plant. Sarana penunjang yang sangat penting adalah sarana pemasaran. Dalam rangka melaksanakan pembiayaan dalam rangka pengembangan Desa Pantai tersebut pada tahap pertama ini dipikirkan bahwa dalam bidang pemasaran produksi diharapkan PT. AMAL WAHAN dapat berfungsi aktif positif, yaitu sebagai the last buyer di dalam negeri. PT. AMAL WAHANA diharapkan akan dapat bertindak sebagai the last buyer baik dalam kaitannya dengan BUUD/KUD maupun dengan P.M.U. Dengan PT. AMAL WAHANA sebagai the last buyer di dalam negeri, diharapkan akan tercipta suatu mekanisme pemasaran yang baik dalam arti adanya sedikit banyak guaranteed market dengan penetapan harga yang layak. Untuk menjaga adanya penetapan harga yang layak ini, perlu adanya kerja-sama yang erat dengan Dinas perdagangan serta pengawasan dari Pemerintah Daerah. Jika dianggap perlu, dapat dibentuk semacam "Komisi Harga" yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan pengusaha termasuk unsur Nelayan. Perlu dikemukakan disini bahwa PT. AMAL WAHANA adalah salah satu usaha Cold Storage yang

ada di Medan, dimana PT. WAHANA dan Bank Dagang Negara telah mengadakan kerja-sama.

3.6. *Penyaluran Fasilitas Kredit dan Pembagian Hasil*

Berdasarkan pola pemilikan kapal dan pola usaha nelayan setempat dimana pada daarnya ada pihak yang disebut sebagai Taoke (Juragan Pemilik Kapal) dan ada yang disebut sebagai Nelayan (Crew dari Taoke), maka perlu ditetapkan bahwa fasilitas kredit disalurkan kepada Taoke, karena Taoke adalah pengusahanya sedang para Nelayan adalah pekerja-pekerja teknis dari Taoke. Tatacara penyaluran kredit tersebut di atas berlaku baik bagi Taoke yang diorganisir oleh Project Management Unit maupun Taoke yang diorganisir oleh BUUD/KUD, yaitu Taoke yang menjadi anggota BUUD/KUD. Tegasnya bahwa kredit harus dinikmati langsung oleh para pengusaha dalam hal ini Taoke dan bukan oleh organisasi. Dalam hal organisasi, misalnya BUUD/KUD memerlukan kredit untuk penyediaan sarana, misalnya truk atau gudang atau lainnya, hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberi fasilitas kredit. Dari informasi yang kami terima dari para Camat dari Desa Pantai, pada waktu ini sistim pembagian hasil antara Taoke dan para Nelayan (Crew dari Taoke) sangat tidak menguntungkan para Nelayan. Dengan adanya fasilitas kredit untuk pada Taoke yang memenuhi syarat, maka pembagian hasil antara Taoke dan para Nelayan harus dirobah sedemikian rupa agar pendapatan para Nelayan meningkat dan pendapatan Taoke juga meningkat agar memungkinkan para Taoke untuk mengembalikan kredit dan membiayai usahanya. Perubahan dari pembagian hasil tersebut harus ditetapkan oleh Team Desa Pantai dan Pemerintah Daerah dan telah dijelaskan kepada para Taoke dan para Nelayan bersangkutan.

PENUTUP

Dengan mulai terlaksananya program pengembangan ekonomi rakyat tahun ini dengan dana Bank Indonesia dan realisasi bantuan luar negeri tahun depan, maka program pembangunan Desa Pantai

benar-benar menghadapi tantangan yang berat. Namun Team tetap optimis bahwa program tersebut akan berhasil baik dan Pemda Sumatera Utara sedang mempersiapkan pola yang sama untuk mengembangkan petani-petani komoditi export dalam Repelita III yang akan datang, sehingga akan terlihat bahwa ekonomi rakyat akan bergerak secara konsepsional.

Trimatra Pembangunan Pertanian Nasional yang baru dirumuskan untuk Repelita III yaitu keterpaduan usaha tani yang dikaitkan dengan keseimbangan vertikal produksi dan imbalan antar komoditi yang bertolak dari pengwilayahan kawasan pertanian justru telah diterapkan oleh Pemda Sumatera Utara sejak tahun 1975 dengan Pola Pembangunan Desa Pantai.

Program komprehensif seperti ini memang menelan dana, waktu dan tenaga yang tidak sedikit seperti halnya dengan tahapan I Program Pembangunan Desa Pantai. Namun tiada sukses yang dapat diraih tanpa ketekunan dan keuletan.

PASARAN OBLIGASI INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Hadi SOESASTRO

PENGANTAR

Pada tanggal 6 Juli 1978 Pemerintah Indonesia mengumumkan telah menjual obligasi RI di Jepang sebesar 10 milyar yen atau sekitar US \$ 48 juta menurut nilai-lawan yen terhadap dollar saat itu. Penjualan obligasi di luar negeri merupakan satu cara (instrumen) untuk menarik modal internasional jangka menengah dan jangka panjang. Bagi Indonesia bentuk pinjaman ini merupakan instrumen baru. Pinjaman melalui cara ini baru merupakan 2% dari keseluruhan pinjaman pemerintah RI (komitmen) untuk tahun anggaran 1978/79 yang diperkirakan akan berjumlah US \$ 2,5 milyar.

Apabila diandaikan bahwa pinjaman pemerintah RI merupakan 50% dari paket modal luar negeri yang masuk ke Indonesia (termasuk penanaman modal asing, pinjaman perusahaan-perusahaan negara dan pihak swasta nasional), maka pinjaman dalam bentuk obligasi ini baru mencapai sekitar 1% dari keseluruhan paket modal luar negeri. Gambaran ini tidak jauh berbeda dari apa yang dapat diamati untuk negara-negara berkembang secara keseluruhan. Dalam tahun 1976, sekitar 2% dari modal luar negeri yang mengalir ke negara-negara berkembang berasal dari penjualan obligasi di pasaran internasional.¹

¹ Dalam tahun 1976 penjualan obligasi di pasaran internasional oleh negara-negara berkembang mencapai sekitar US\$ 1,6 milyar. Dalam tahun yang sama, modal internasional yang mengalir ke negara-negara berkembang berjumlah sekitar US\$ 80 milyar.

Dalam tahun itu hanya 5% dari penjualan obligasi di pasaran internasional berasal dari negara-negara berkembang. Hal ini menunjukkan betapa terbatasnya akses negara-negara berkembang ke pasaran obligasi internasional, padahal sebelum Perang Dunia ke-II, penjualan obligasi di luar negeri adalah sumber pembiayaan dari luar negeri yang utama bagi negara-negara berkembang.

Tulisan ini membahas perkembangan pasaran obligasi internasional dalam tahun 1970-an ini serta artinya sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pembahasan mengenai pinjaman dalam bentuk penjualan obligasi internasional dan hubungannya dengan pembiayaan pembangunan dapat ditinjau dalam kerangka pemikiran tentang alternatif-alternatif pembiayaan.

Dalam kerangka serupa di atas, setiap tambahan dalam jenis instrumen pembiayaan dapat dilihat sebagai peluang tambahan bagi pihak perencana untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan pembiayaan pembangunan yang bersifat fleksibel. Dengan perkataan lain, terbukanya jalan ke pasaran obligasi internasional memberikan kepada para perencana pilihan-pilihan yang lebih luas. Apabila ada ditetapkan jumlah absolut modal luar negeri yang diperlukan untuk mencapai target-target pembangunan, maka pinjaman dalam bentuk obligasi internasional sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai suatu *substitusi* untuk bentuk pinjaman (modal) lain. Dibandingkan dengan jenis-jenis modal lainnya yang lazim diterima (dipinjam) oleh negara-negara berkembang, seperti bantuan luar negeri (khususnya project aid), kredit ekspor (atau yang juga disebut suppliers' credit) dan penanaman modal asing (foreign direct investment), secara relatif modal yang diperoleh dari pasaran modal internasional memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pihak pemim-pinjamnya untuk mengalokirkannya. Demikian pula apabila ada diperkirakan bahwa di kelak kemudian hari kebutuhan akan modal luar negeri tidak lagi sepenuhnya dapat dipenuhi oleh jenis-jenis modal yang digunakan saat ini, maka akses ke pasaran obligasi internasional itu sendiri sudah dapat dilihat sebagai suatu bentuk *cadangan* ('second line of reserves').

PERKEMBANGAN PASARAN OBLIGASI INTERNASIONAL

Pasaran obligasi internasional merupakan bagian dari pasaran modal internasional. Yang terakhir juga meliputi pasaran kredit dengan denominasi berbagai mata uang negara-negara industri dan dikenal sebagai pasaran *Euro-currency*. Kredit perbankan yang diberikan dalam rangka pasaran Euro-currency ini berbentuk pinjaman yang dinyatakan dalam mata uang yang bukan merupakan mata uang dari negara di mana bank bersangkutan berada. Sejak permulaan tahun 1970-an pasaran modal internasional berkembang dengan sangat pesat. Volume modal internasional, baik dalam bentuk penjualan obligasi melalui maupun pemberian kredit oleh bank-bank internasional yang membentuk pasaran modal ini, secara nominal meningkat dari sekitar US \$ 9 milyar dalam tahun 1970 menjadi sekitar US\$ 74 milyar dalam tahun 1977 (lihat Tabel 1). Dari jumlah modal internasional ini, sekitar 40% diperoleh pihak peminjamnya melalui instrumen penjualan obligasi.

Tabel 1

PASARAN MODAL INTERNASIONAL

	1970	1973	1977	1978 (Jan.—Mei)
Jumlah Total (Juta US\$)	9.290	29.689	73.842	40.151
(Prosen)	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
Obligasi Inter- nasional (%)	49,1	26,4	43,6	37,9
Kredit Perbankan Internasional (%)	50,9	73,6	56,4	62,1

Sumber : Morgan Guaranty Trust Company of New York, *World Financial Markets* (Berbagai Terbitan). Untuk selanjutnya disingkat dengan Morgan Guaranty.

Obligasi yang diperjualbelikan dalam pasaran modal internasional dapat berbentuk *Euro-bond* atau *obligasi asing* (Foreign Bond). *Euro-bond* menyangkut penjualan obligasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh suatu sindikat internasional dan untuk sebagian terbesar dijual di negara-negara yang lain daripada negara yang mata uangnya digunakan sebagai denominasi dari obligasi tersebut. Misalnya, obligasi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Norwegia atau perusahaan Philips (Nederland) dengan nilai yang dinyatakan dalam dollar, jadi mata-uang Amerika Serikat, dan dijual di Jerman Barat, Swiss atau Kuwait. Di pihak lain, obligasi asing (Foreign Bond) menyangkut penjualan obligasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh suatu sindikat yang anggotanya berasal dari *satu* negara, dijual untuk sebagian terbesar (atau seluruhnya) di negara itu, dengan nilai yang dinyatakan dalam mata-uang negara bersangkutan. Misalnya, obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia bulan Juli 1978 ini dilaksanakan penjualannya di Jepang oleh suatu sindikat Jepang yang diketuai oleh Nomura Securities, dan nilainya dinyatakan dalam yen.

Tabel 2

PENJUALAN OBLIGASI DI PASARAN INTERNASIONAL (Menurut Jenis dan Menurut Denominasi Mata Uang)

	1970	1973	1977	1978 (Jan.—Mei)
Jumlah Total				
(Juta US\$)	4.560	7.838	32.206	15.220
(Prosen)	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
Menurut jenis				
Euro-bond	65,0	53,5	55,1	46,9
Foreign Bond	35,0	46,5	44,9	53,1
di				
Amerika Serikat	26,7	13,0	22,6	21,9
Jerman Barat	2,0	4,6	6,5	3,8
Swiss	4,2	19,5	10,8	12,1
Jepang	0,3	3,5	3,9	12,4
Lain-lain	1,8	5,9	1,1	2,9

ANALISA

Tabel 2 (Lanjutan)

	1970	1973	1977	1978 (Jan—Mei)
Menurut Mata Uang				
US dollar	65,6	44,2	58,7	44,1
Deutsche mark	17,0	17,7	19,3	23,4
Swiss franc	4,2	19,5	10,8	12,1
Yen	0,3	3,5	3,9	12,4
Lain-lain	12,9	15,1	7,3	8,0

Sumber : Morgan Guaranty

Perkembangan pasaran obligasi internasional dari tahun 1970 ke tahun 1977 dan selama lima bulan pertama tahun 1978 dapat dilihat dari Tabel 2. Secara nominal volume penjualan obligasi di pasaran modal internasional meningkat dari sekitar US\$ 4,6 milyar dalam tahun 1970 menjadi sebesar US\$ 32,2 milyar dalam tahun 1977. Pertumbuhan pasaran obligasi internasional yang cukup menyolok ini tentu tidak tanpa sesuatu sebab. Ada pun sebabnya dapat terletak pada segi permintaan akan modal (yaitu pihak yang mengeluarkan obligasi) ataupun pada segi penawaran modal (yaitu pihak yang membeli obligasi) atau pada kedua-duanya. Data-data transaksi, *ex post*, seperti dalam Tabel 2 biasanya tidak langsung dapat memberikan petunjuk tentang sebab-sebab yang sebenarnya. Tetapi masalah serupa ini dapat dipecahkan apabila diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi segi permintaan dan segi penawaran.

Arus modal dari negara yang satu ke negara lainnya terjadi karena di bagian ekonomi dunia yang satu terdapat kelebihan tabungan relatif terhadap kebutuhan investasi domestiknya dan di bagian yang lain terdapat kekurangan tabungan relatif terhadap kebutuhan investasi domestiknya. Dalam ekonomi dunia, yang terdiri dari unit-unit ekonomi terbuka, kelebihan atau kekurangan tabungan ini tercermin dalam neraca perdagangan (current account) dan neraca uang ("money account") — yaitu perubahan cadangan devisa dan emas moneter — unit-unit ekonomi bersangkutan, dan transaksi modal yang ter-

jadi dicatat dalam neraca modal (capital account). Pengamatan terhadap neraca perdagangan dan neraca uang unit-unit ekonomi yang tergabung dalam ekonomi dunia menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang menyolok terjadi selama tahun 1974 dan tahun 1975, sebagai salah satu akibat dari kenaikan harga minyak dunia. Perubahan ini berakibat tiga hal. Pertama, bergesernya kelebihan tabungan dari bagian ekonomi dunia yang satu ke bagian lainnya, yaitu dari negara-negara industri Barat ke negara-negara OPEC, khususnya Arab Saudi. Kedua, meningkatnya volume modal internasional yang mengalir melalui pasaran modal internasional. Ketiga, sebagai akibat dari kebijaksanaan penyesuaiannya (adjustment policies) terhadap perubahan ekonomi dunia sejak tahun 1974, beberapa negara industri Barat berada dalam surplus neraca pembayaran secara terus-menerus.

Tabel 3

SEBAB—SEBAB YANG MEMPENGARUHI VOLUME MODAL INTERNASIONAL
(Juta US\$)

	1973	1974	1975
Neraca Perdagangan^a			
Negara Industri Barat	19.106	—3.528	23.582
OPEC	6.206	67.530	34.827
Negara Berkembang Non-OPEC	— 9.930	—29.097	—37.714
Neraca Uang^b			
Negara Industri Barat	— 1.366	—15.756	65
OPEC	4.341	45.799	17.843
Negara Berkembang Non-OPEC	7.903	843	— 4.129

Sumber : IMF, *International Financial Statistics* (Agustus 1977)

^aTermasuk transfer

^bPerubahan cadangan devisa dan emas moneter

SEGI PENAWARAN DALAM PASARAN OBLIGASI INTERNASIONAL

Pasaran obligasi internasional juga terpengaruh oleh perubahan dalam volume dan struktur permintaan akan dan penawaran modal internasional. Pengaruh terhadap pasaran obligasi internasional antara lain bersumber pada perbedaan preferensi (asset preference) negara-negara OPEC dengan negara-negara industri Barat dalam menanamkan uangnya. Khususnya dalam tahun 1974/75, kelebihan tabungan atau surplus neraca perdagangan negara-negara OPEC disimpan dalam bentuk deposito jangka pendek pada pasaran Euro-currency atau sebagai asset yang berjangka-sangat-pendek, yaitu dalam bentuk cadangan devisa. Sedangkan pasaran obligasi internasional adalah pasaran modal jangka panjang. Penjualan obligasi di pasaran modal internasional menurun dari US\$ 7,8 milyar dalam tahun 1973 menjadi US\$ 6,9 milyar dalam tahun 1974, tetapi kemudian meningkat menjadi US\$ 19,9 milyar dalam tahun 1975 dan US\$ 32,5 milyar dalam tahun 1976.

Kalaupun sejak tahun 1975 bank-bank internasional yang membentuk pasaran modal internasional meningkatkan volume dari deposito Euro-currency (modal jangka pendek) yang ditransformir menjadi modal jangka menengah (kredit Euro-currency) dan modal jangka panjang (Euro-bond), sebagai tanggapan terhadap struktur permintaan yang ada, tetapi peningkatan volume di pasaran obligasi internasional untuk sebagian terbesar terjadi karena peningkatan volume obligasi asing (Foreign Bond). Perubahan komposisi dalam pasaran obligasi internasional ini dapat diamati dari Tabel 2. Dalam tahun 1970, dari keseluruhan obligasi yang dikeluarkan di pasaran internasional 65% berbentuk Euro-bond dan 35% berbentuk obligasi asing (Foreign Bond). Dalam lima bulan pertama tahun 1978, 47% berbentuk Euro-bond dan 53% berbentuk obligasi asing (Foreign Bond).

Di antara negara-negara industri Barat terdapat tiga negara yang berhasil dan mungkin secara berlebihan mengatasi akibat kenaikan harga minyak dunia, yaitu Jerman Barat, Swiss, dan

Jepang, melalui pengetatan impor dan penggalakan ekspor dengan ditunjang oleh kebijaksanaan moneter yang cukup ketat. Sebagai akibatnya, negara-negara ini secara terus-menerus berada dalam surplus neraca perdagangan, dan kini mereka seringkali disebut sebagai "inherently surplus countries", seperti juga halnya dengan Arab Saudi dan Kuwait di antara negara-negara OPEC. Bila bagi negara-negara seperti Arab Saudi dan Kuwait surplus neraca perdagangan ini bersumber pada terbatasnya kapasitas absorpsi mereka, bagi negara-negara seperti Jerman Barat, Swiss, dan Jepang, peningkatan impor dikuatirkan akan terlalu menghangatkan ekonominya. Di pihak lain, penggalakan ekspor dibutuhkan untuk mengurangi atau mencegah meningkatnya tingkat pengangguran. Tetapi, surplus itu sendiri, apabila tidak dapat disalurkan kembali ke luar ekonominya, dan dengan demikian menjadi tambahan cadangan devisa yang terus-menerus meningkat, juga dapat mengakibatkan kenaikan tingkat inflasi, di satu pihak, dan mempersulit penguasa moneter untuk mempertahankan nilai lawan (kurs) mata uangnya, di pihak lain. Apabila nilai lawan mata uang negara-negara ini mengalami apresiasi terus-menerus, posisi kompetitif mereka dalam perdagangan internasional akan menurun dengan berakibat pada pengangguran di dalam negeri.

Maka negara-negara surplus ini berusaha mengalirkan uangnya ke luar, dan untuk sebagian besar disalurkan ke dan melalui pasaran modal internasional. Penghasilan devisa negara-negara OPEC surplus memang untuk sebagian besar secara langsung sudah disimpan pada bank-bank internasional. Sebaliknya, oleh karena struktur penerimaan devisa di negara-negara seperti Jerman Barat, Swiss, dan Jepang berbeda dengan di negara-negara OPEC surplus, yaitu untuk sebagian besar diterima oleh masyarakatnya, maka mekanisme untuk menyalurkan kelebihan tabungan itu juga agak berbeda. Mekanisme penyaluran ini bergantung tidak hanya dari preferensi (asset preference) unit-unit pemegang kelebihan tabungan ini dalam menanamkan uangnya, tetapi juga dari struktur hubungan antara pasaran modal domestik di negaranya dengan pasaran modal internasional maupun dari tingkat liberalisasi pasaran mata uang asing (foreign exchange market) di negara-negara bersangkutan.

Dari Tabel 2 dapat dilihat peranan yang meningkat dari modal yang berasal dari Jerman Barat, Swiss, dan Jepang dalam pasaran obligasi internasional. Dalam tahun 1970 obligasi yang nilainya dinyatakan dalam Deutsche mark, Swiss franc, dan yen adalah 17%, 4,2%, dan 0,3% dari keseluruhan penjualan obligasi. Dalam lima bulan pertama tahun 1978, peranan masing-masing meningkat menjadi 23,4%, 12,1%, dan 12,4%. Peningkatan yang terbesar menyangkut penjualan obligasi di Jepang yang dinyatakan dalam Yen. Tampaknya kelebihan likwiditas di Jepang merupakan tekanan yang cukup besar bagi ekonominya. Maka tidak mengherankan apabila Bank of Tokyo telah ikut memainkan peranan dalam penjualan obligasi RI di Jepang. Sebaliknya, oleh karena pasaran mata uang asing di Jerman Barat jauh lebih liberal daripada di Jepang, sebagian terbesar dari kelebihan tabungan itu lebih mudah disalurkan ke pasaran Euro-bond.

SEGI PERMINTAAN DALAM PASARAN OBLIGASI INTERNASIONAL

Sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia dalam tahun 1974, juga terjadi perubahan-perubahan dalam struktur permintaan di pasaran obligasi internasional. Untuk membiayai neraca pembayarannya, pemerintah-pemerintah dari negara-negara defisit, baik negara-negara industri maupun negara-negara berkembang non—OPEC, meningkatkan penjualan obligasi di pasaran internasional. Sebaliknya, sebagai akibat resesi tahun 1975, terjadi kelesuan dalam dunia usaha swasta, dan terjadi penurunan secara prosentuil dari penjualan obligasi oleh perusahaan-perusahaan swasta, terutama perusahaan swasta Amerika Serikat (lihat Tabel 4). Dalam tahun 1970, dari keseluruhan penjualan obligasi internasional, 62,5% dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan swasta dan 22,5% dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara. Dalam lima bulan pertama tahun 1978, perbandingan ini menjadi 32,2% dan 58,7%.

Tabel 4

PINJAMAN DALAM BENTUK OBLIGASI INTERNASIONAL (Menurut Kategori Peminjam dan Menurut Negara Peminjam)				
	1970	1973	1977	1978 (Jan.—Mei)
Jumlah Total (%)	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
Menurut Kategori				
Perusahaan Swasta (Amerika Serikat)	62,5 (17,5)	51,6 (18,1)	39,0 (3,6)	32,2 (3,5)
Pemerintah/Perusahaan Negara	22,5	31,2	42,9	58,7
Organisasi Inter- nasional	15,0	17,2	18,1	9,1
Menurut Negara				
Negara Industri Barat	83,3	74,4	70,0	75,8
Negara Komunis	0	0	0,8	
Negara Berkembang	1,7	8,4	11,1	15,1
Organisasi Inter- nasional	15,0	17,2	18,1	9,1

Sumber : Morgan Guaranty

Selama tahun 1970-an ini terjadi peningkatan akses negara-negara berkembang ke pasaran obligasi internasional. Dalam tahun 1970, dari keseluruhan penjualan obligasi di pasaran internasional 1,7% dikeluarkan oleh negara-negara berkembang. Selama lima bulan pertama tahun 1978, sekitar 15% dari penjualan obligasi internasional berasal dari negara-negara berkembang. Tetapi dibandingkan dengan kebutuhan negara-negara berkembang akan modal luar negeri, pinjaman dalam bentuk obligasi internasional baru merupakan bagian yang kecil. Akses negara-negara berkembang ke pasaran obligasi internasional juga terbatas pada beberapa negara saja. Dalam tahun 1970 hanya satu negara, yaitu Argentina, yang berhasil menjual obligasinya di pasaran internasional dalam jumlah yang cukup berarti (US\$ 70 juta). Dalam tahun 1977, dari keseluruhan obligasi yang dikeluarkan oleh negara-negara berkembang (yaitu

sejumlah US\$ 3,6 milyar), sekitar sepertiga berasal dari Meksiko, 20% dari Brazil, 12% dari Venezuela, disusul oleh Singapura (9%), Algeria (7%), Hongkong (4%) dan Pilipina (3%).

Akses negara-negara berkembang ke pasaran obligasi internasional ternyata memang terbatas. Salah satu hambatannya terletak pada terbatasnya lingkup dan aktivitas pasaran sekunder untuk obligasi yang dikeluarkan oleh negara-negara berkembang. Akses negara-negara berkembang ke pasaran Euro-bonds lebih besar dari pada ke pasaran Foreign Bonds.¹ Pada umumnya ada anggapan bahwa masuknya sesuatu negara berkembang ke pasaran obligasi internasional merupakan "the ultimate test of its creditworthiness". Sampai batas tertentu kelebihan likwiditas dewasa ini mempermudah akses ke pasaran obligasi internasional, tetapi penilaian pasar tentang kredibilitas sesuatu negara berkembang tetap berat. Dalam pasaran ini, negara-negara berkembang seperti Meksiko dan Brazil hampir tidak menghadapi saingan.

HARGA MODAL DALAM PASARAN OBLIGASI INTERNASIONAL

Penilai pasar mengenai kredibilitas (atau risiko) sesuatu negara atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi tercermin dalam "coupon rate" obligasi bersangkutan. Dalam pasaran ini obligasi tidak akan terjual walaupun pihak yang mengeluarkannya bersedia menetapkan coupon rate-nya di atas yang berlaku untuk peminjam dalam kelas risiko yang sama. Perbedaan kelas-kelas risiko dapat dilihat dari pendapatan (yields) dari obligasi bersangkutan di pasaran sekunder.

Dalam Tabel 5 juga terlihat perbedaan pendapatan (yields) dari obligasi yang dikeluarkan oleh kelas risiko yang sama tetapi yang dinyatakan dalam mata uang yang berbeda. Secara nominal, belakangan ini pendapatan (yields) dari obligasi yang dinyatakan dalam US dollar lebih tinggi daripada yang dinyatakan dalam Deutsche mark dan Swiss franc.

1 Lihat World Bank, *Annual Report 1977*. Dalam tahun 1976 lebih dari 60% dari penjualan obligasi oleh negara-negara berkembang berbentuk Euro-bond.

Tetapi secara riil, pendapatan (realized real yields) dari obligasi yang dinyatakan dalam US dollar lebih rendah daripada yang dinyatakan dalam Deutsche mark dan Swiss franc.

Tabel 5

PENDAPATAN (YIELDS) DARI OBLIGASI INTERNASIONAL*
(Menurut-Kategori Peminjam dan Menurut Denominasi Mata Uang)
(Prosen per Tahun)

	1973 (Des.)	1977 (Des.)	1978 (Jan.)
Perusahaan Amerika			
US dollar	8,3 (0,8)	8,0 (0,2)	8,0 (1,1)
Deutsche mark	9,3 (0,9)	6,4 (2,5)	6,4 (3,2)
Swiss franc	6,7 (—2,1)	5,3 (4,0)	5,4 (3,4)
Perusahaan Eropa			
US dollar	8,6 (1,1)	8,4 (0,6)	8,6 (1,7)
Deutsche mark	9,3 (0,9)	6,8 (2,9)	6,8 (3,6)
Pemerintah			
US dollar	8,7 (1,2)	8,4 (0,6)	8,5 (1,6)

Sumber : Morgan Guaranty dan IMF, *International Financial Statistics*

* Pendapatan (yields) di pasaran sekunder. Angka-angka dalam kurung adalah pendapatan riil (realized real yields), dan diperoleh dari penyesuaian pendapatan nominal dengan tingkat inflasi yang berlaku untuk negara yang mata uangnya dijadikan denominasi obligasi bersangkutan.

Pendapatan riil (di pasaran sekunder) yang lebih tinggi dari obligasi yang dinyatakan dalam Deutsche mark dan Swiss franc dibandingkan dengan yang dinyatakan dalam US dollar menunjukkan kuatnya permintaan akan mata uang Jerman Barat dan Swiss. Kedua jenis mata uang ini — begitu pula yen — menarik bagi pasaran modal dan pasaran uang (money markets) oleh karena terkait pada negara-negara dengan tingkat inflasi yang relatif rendah serta kebijaksanaan moneter yang cukup stabil. Sebaliknya, mata uang negara-negara industri Barat lainnya, seperti lira, pound, franc (Perancis) dan US dollar, dipandang sebagai uang yang suplainya cenderung untuk ekspansi secara berlebihan (overexpansion) dan bersifat sangat fluktuatif. Tetapi permintaan yang kuat akan mata uang Jerman

ANALISA

Barat, Swiss, dan Jepang, juga menyebabkan nilai mereka meningkat dalam pasaran mata uang asing (foreign exchange markets) dengan akibat bahwa daya beli mereka menjadi "over-valued" relatif terhadap mata uang negara-negara industri Barat lainnya. Secara sepintas lalu, uraian di atas tampak bertentangan dengan fakta surplus perdagangan yang terus-menerus dari negara-negara tersebut. Tetapi surplus juga mencerminkan lemahnya permintaan di dalam negeri, hal mana juga merupakan akibat dari mata uang yang "overvalued".¹

PENUTUP

Uraian di atas, walaupun terbatas pada pasaran obligasi internasional — perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, juga memberikan gambaran umum mengenai perkembangan pasaran modal internasional secara keseluruhan. Sejak tahun 1974/75, arus modal internasional meningkat oleh karena terjadi ketimpangan yang menyolok dalam ekonomi dunia antara bagian yang kelebihan tabungan dan bagian yang kekurangan tabungan, masing-masing relatif terhadap kebutuhan (kemampuan) investasinya. Dalam melancarkan arus modal internasional antara unit-unit ekonomi dalam struktur ekonomi dunia serupa ini pasaran modal internasional, yaitu bank-bank internasional, memperoleh peranan yang sangat besar.

Struktur ekonomi dunia beserta arus dan mekanisme yang mengatur aliran modal internasional di atas akan mengalami perubahan *apabila* terjadi perubahan-perubahan yang sinkron antara unit-unit ekonomi yang berada di dalamnya. Dalam kerangka analisa ini, ekonomi dunia dapat dibagi dalam unit-unit sebagai berikut: (a) negara-negara OPEC surplus; (b) negara-negara industri Barat yang disebut "inherently surplus countries"; (c) Amerika Serikat sebagai unit ekonomi yang terbesar dengan mata uangnya yang masih tetap merupakan alat utama pengaturan (dan pembayaran) transaksi-transaksi dalam

1 Lihat Harold van B. Cleveland, "A View from Wall Street: Demand Management Fails", dalam *The Washington Review*, Vol. 1 No. 1 (Januari 1978), hal. 78—88

ekonomi dunia; (d) negara-negara industri Barat lainnya, seperti Inggris, Perancis, dan Italia; (e) negara-negara berkembang, yang berpendapatan rendah (low-income LDCs) di satu pihak dan yang berpendapatan sedang dan tinggi (middle-and high income LDCs) di pihak lain. Perubahan-perubahan dalam tata hubungan antara unit-unit ekonomi ini akan tercermin dalam gerakan (movement) dari neraca pembayarannya masing-masing. Tetapi pada akhirnya, neraca pembayaran sesuatu negara hanya merupakan serangkaian "jendela-jendela" yaitu berupa neraca perdagangan (current account), neraca modal (capital account), serta neraca uang ("money account"), dan seberapa lebar masing-masing jendela tersebut dibuka (atau ditutup) untuk sebagian besar juga bergantung dari kebijaksanaan-kebijaksanaan negara yang bersangkutan.

Dalam struktur ekonomi dunia yang berlaku dewasa ini, ternyata hanya sebagian kecil dari kelompok negara-negara berkembang yang telah dapat mengambil manfaat. Meksiko dan Brazil, dua negara berkembang dengan "kekurangan tabungan relatif terhadap kebutuhan investasinya", merupakan contoh populer saat ini tentang keberhasilan negara yang sedang berkembang untuk mengaitkan dirinya kepada pasaran modal internasional. Akses ini tidak diperoleh tanpa usaha. Dalam rangka ini dapat dinilai arti penjualan obligasi RI di Jepang. Dari sudut nilai dan dibandingkan dengan kebutuhan Indonesia akan modal internasional, penjualan ini belum berarti. Tetapi sesedikitnya telah terbuka jalan untuk dapat diambil manfaat yang lebih besar dari struktur ekonomi dunia yang berlaku dewasa ini, yaitu kecukupan likwiditas yang sebagian besar disalurkan melalui pasaran modal internasional.

Tabel L-1

PINJAMAN DALAM BENTUK OBLIGASI INTERNASIONAL (Menurut Tempat Penjualan)
 Dalam Juta US\$

	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978 ^s (JAN — MEI)
Jumlah Total	4.560	6.284	9.748	7.838	6.857	19.911	32.516	32.206	15.220
Euro-bonds	2.966		6.335	4.193	2.134	8.567	14.328	17.735	7.145
Foreign Bonds	1.594	2.642	3.413	3.645	4.723	11.334	18.188	14.471	8.075
di									
Amerika Serikat	1.216	1.104	1.353	1.019	3.291	6.460	10.602	7.286	3.336
Jerman Barat	89	308	500	362	253	1.089	1.288	2.096	571
Swiss	193	669	815	1.526	911	3.297	5.359	3.463	1.838
Jepang	15	92	311	271	0	67	226	1.271	1.883
Lain-lain	81	469	434	467	268	421	713	355	447

SUMBER : Morgan Guaranty Trust Company of New York, *World Financial Markets* (Berbagai Terbitan)

^s Angka sementara

Tabel L-2

PINJAMAN DALAM BENTUK OBLIGASI INTERNASIONAL
 (Menurut Negara Peminjam)
 Dalam Juta US\$

	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Jumlah Total	4.560	6.284	9.748	7.838	6.857	19.911	32.516	32.206
Negara Industri Barat	3.800	4.930	7.415	5.829	5.390	15.214	24.200	22.554
Negara Komunis	0	25	50	0	40	239	96	248
Organisasi Internasional	686	1.231	1.719	1.345	1.165	3.873	6.626	5.839
Negara Berkembang	74	98	564	664	263	585	1.595	3.565

SUMBER : Morgan Guaranty Trust Company of New York, *World Financial Markets* (Maret 1978)

MANAJEMEN ABRI "GAYA M. YUSUF"

Christianto WIBISONO

Menteri Hankam/Pangab Jendral TNI M. Yusuf selama beberapa bulan terakhir ini telah melakukan gebrakan-gebrakan tindakan yang sangat mendasar dan besar pengaruhnya dalam lingkungan ABRI. Mengingat bahwa situasi politik di negara kita sangat tergantung kepada kemampuan ABRI untuk menjalankan dwi-fungsinya dengan baik, maka gebrakan tindakan yang dilakukan oleh Menhankam/Pangab tersebut akan mempunyai dampak (impact) yang sangat besar bagi stabilitas dan dinamika sistem politik Indonesia. Apabila Dr. Soedjatmoko sebagai intelektual pemenang hadiah Magsaysay sering mengemukakan pendekatan "strategi pemenuhan kebutuhan dasar" (basic-needs fulfillment strategy), maka Jendral M. Yusuf dengan langkah-langkah langsung memperbaiki kesejahteraan hidup prajurit telah menerapkan teori itu secara konkrit. Kenaikan uang lauk pauk, perbaikan asrama, pemberian perlengkapan minimal yang layak bagi prajurit, ancaman dan sanksi bagi atasan/pejabat yang memotong hak dan jatah prajurit. Ini benar-benar merupakan suatu langkah yang sangat fundamental, sangat revolusioner dan radikal. Suatu penerapan asas pemerataan pembangunan dan pemberian kesempatan langsung kepada lapisan terendah atau terbawah dari ABRI untuk memperoleh hak-hak dan kebutuhan dasar mereka sebagai manusia dan sebagai prajurit.

Jendral M. Yusuf telah menyentuh masalah yang sangat mendasar yaitu bagaimana lapisan terbawah dalam lingkungan ABRI mendapat perhatian layak, agar harkatnya sebagai manusia tidak dihambat oleh tingkat kemiskinan yang berada di bawah garis kemiskinan absolut. Disamping itu agar manusia Indonesia yang menjadi prajurit itu senantiasa siap secara mental maupun fisik menghadapi segala tantangan dalam memikul beban tugas sebagai penjaga dan pemelihara Integrasi Nasional. Senjata yang bagaimanapun hebatnya dan mutakhirnya, apabila manusia yang menanganinya tidak mempunyai rasa kebanggaan, rasa percaya pada diri sendiri, tidak akan ada artinya. Prajurit yang diganggu oleh pikiran tentang keluarganya, yang diganggu oleh kesehatan jasmaninya karena kekurangan persyaratan gizi niscaya tidak akan menghasilkan kekuatan yang ampuh. Dan yang paling penting dalam tindakan Yusuf adalah dikembalikannya rasa solidaritas, rasa kesetia-kawanan dalam tubuh ABRI. Apabila selama ini seolah-olah terjadi juga 'gap' antara prajurit dan atasan atau antara pasukan dan jawatan yang melayani, karena beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatan empuk untuk mengurangi hak dan jatah pasukan atau prajurit, maka tindakan Yusuf merupakan satu langkah drastis yang patut didukung oleh semua lapisan masyarakat. Sayang bahwa dukungan konkrit berupa pernyataan yang resmi dan terbuka dari kekuatan-kekuatan politik baik melalui forum DPR ataupun DPP Parpol dan Golkar tidak diperlihatkan. Tampaknya memang begitulah penyakit masyarakat yang sedang membangun.

Masyarakat atau pengamat politik biasanya lebih suka melontarkan kritik atau kecaman pedas dan jarang yang memuji prestasi atau hasil positif. Seperti pameo mengatakan, kalau ada kejelekan atau keburukan bisa ditiup atau dibesar-besarkan, tapi kalau ada langkah-langkah positif, dianggap suatu hal yang biasa saja, tidak perlu diberi 'applaus'. Langkah-langkah Jendral M. Yusuf dalam memperhatikan faktor manusia dalam organisasi ABRI merupakan penerapan sistem manajemen yang sehat dan universal. Langkah-langkah itu patut mendapat dukungan agar bisa disempurnakan lebih lanjut di masa depan dan diisi dengan tindak-lanjut yang lebih maju lagi.

Prajurit kita adalah modal paling penting dalam organisasi ABRI, karena itu kesiapan fisik dan mentalnya merupakan faktor utama. Faktor peralatan modern hanya merupakan pelengkap. Terbukti misalnya bahwa seperangkat teknologi peperangan Amerika Serikat bahkan diusir oleh tentara Vietnam. Motivasi yang tumbuh dari hati sanubari prajurit, kebanggaan, rasa harga diri dan percaya diri sendiri, kesediaan berkorban dan rasa solidaritas dari keseluruhan korps sangat mempunyai peranan bagi suatu ABRI yang tangguh. Jendral Yusuf telah memberikan investasi yang luar biasa bagi perkembangan ABRI, yaitu suatu 'human investment' dengan biaya yang relatif murah. Murah, sebab yang dipakai adalah strategi pemenuhan kebutuhan dasar prajurit dan bukan mengikuti arus konsumtif atau selera keserakahan manusia yang materialis.

Memang konsekwensi bagi anggaran belanja negara akan berat. Bubur kacang ijo bagi prajurit kelihatannya sepele, tapi dikalikan jumlah prajurit dan frekwensi jatahnya bisa mencapai angka milyar rupiah. Demikian pula kenaikan uang lauk-pauk yang sekarang menjadi Rp. 375 kalau diterjemahkan dalam budget keseluruhan ABRI barangkali juga mencapai milyar. Perbaikan asrama penambahan kelengkapan prajurit seperti sepatu dan pakaian, semuanya itu punya konsekwensi bagi anggaran negara. Tapi di atas semua itu kita memang harus mengubah cara berfikir yang keliru di masa lampau. Karena uang tidak cukup, ya biarkan saja pegawai negeri atau ABRI mencari dan memanfaatkan hidup sendiri. Ini menimbulkan gejala komersialisasi jabatan di segala tingkatan dari yang rendah sampai pejabat tinggi. Di tingkat rendah sekedar mencukupi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi oleh gaji yang di bawah minim. Di tingkat menengah ke atas biasanya terseret oleh arus keserakahan konsumsi tinggi, sehingga walaupun gaji sudah cukup masih ingin bermewah-mewah. Pada gilirannya keadaan yang berlarut-larut ini menimbulkan gap yang besar antara lapisan masyarakat berpenghasilan rendah yang harus berjuang untuk survive dan sebagian kecil oknum-oknum yang merupakan kelas tersendiri melalui kelihayan mereka memanfaatkan posisi-posisi tertentu. Hal ini menimbulkan erosi dan ketidak-puasan, solidaritas dan disiplin menurun, sehingga harus

diatasi secara mendasar. Barangkali pendekatan M. Yusuf memang agak 'surprise' buat Bappenas dan masyarakat, tapi hal ini harus dilakukan sekarang juga daripada semakin berlarut-larut.

Selama hampir limabelas tahun, Jendral Yusuf bergelimang di antara para industrialis, mondar mandir dari satu pabrik ke lain pabrik, semuanya mempergunakan dana bermilyar rupiah. Sudah pasti bahwa dana itu sebagian berasal dari negara dan merupakan milik nasional, di samping unsur asing dari luar negeri maupun unsur swasta. Berarti, kita memang punya sumber dana untuk membangun pabrik, suatu unit produksi yang diharapkan memberi hasil konkrit.

Walaupun secara mendadak sekali Jendral Yusuf mendapat tugas di Departemen Hankam, tapi bagaikan seorang yang kembali ke kandang asalnya, bekas Pangdam Hasanudin ini langsung memperhatikan nasib prajurit. Hal ini memang merupakan satu syarat mutlak. Apabila dana bermilyar rupiah dialirkan ke sektor industri, diharapkan sektor ini akan menghasilkan nilai produksi berupa keuntungan. Dalam hal Angkatan Bersenjata maka produk yang harus keluar adalah suatu *pasukan* yang berdisiplin serta berkemampuan teknis-profesional mempergunakan teknologi mutakhir, sekaligus mampu menjalankan fungsi sebagai kekuatan sosial politik memberi teladan kepada masyarakat. Jadi kualitas manusia itulah yang merupakan sasaran dalam organisasi ABRI. Apabila prajurit-prajurit itu hidup dalam kondisi di bawah garis kemiskinan, kemudian melihat kepincangan-kepincangan yang terdapat dalam masyarakat, niscaya mereka akan berada dalam kondisi fisik dan mental yang tidak siap untuk melaksanakan tugas dan beban berat mereka sebagai alat pemelihara integrasi nasional dan alat stabilisasi dan dinamisasi sosial politik.

Karena itu walaupun barangkali langkah gebrakan M. Yusuf menyulitkan susunan APBN, konsekwensi logisnya adalah perubahan atau pergeseran prioritas. Harus ada dana untuk peningkatan kesejahteraan prajurit agar dapat hidup sesuai harkat martabat manusia dan secara mental mereka dibebaskan dari pengaruh ketidakadilan sosial yang masih ada. Apabila mereka memperoleh kembali kecintaan dan kebanggaan serta

kepercayaan kepada pimpinan ABRI yang akan menindak tegas oknum-oknum yang mengurangi hak dan jatah mereka, maka yang menjadi persoalan di sini bukan sekedar uang, lauk pauk yang dipotong atau pakaian dan sepatu yang dikorup. Yang menjadi soal di sini adalah *kewibawaan pimpinan dan loyalitas serta disiplin pasukan*. Bagi prajurit, kerugian materi dipotong uang sakunya barangkali masih bisa ditutup dengan mengobyek di luaran. Tapi justru konsekwensi mengobyek ditambah rasa tidak puas terhadap oknum atasan itu bisa merusak *solidaritas dan loyalitas* serta mengganggu motivasi pengabdian mereka. Inilah kerugian mental yang sulit diukur dengan angka. Tidak akan ada artinya peralatan super modern yang serba mewah dan mahal, kalau pasukan yang melayani peralatan itu sekedar menjadi petugas yang merasa terpaksa, resah dan kurang disiplin akibat faktor-faktor hilangnya kewibawaan pimpinan dan merosotnya disiplin dan loyalitas akibat kepincangan dan ketidakadilan. Dalam konteks inilah bisa dilihat bahwa investasi materiil Yusuf yang dalam milyar rupiah mungkin bernilai beberapa unit industri, akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih bernilai dibanding produk pabrik tertentu.

Pergeseran prioritas APBN untuk memenuhi kebutuhan prajurit adalah sejalan dengan Sapta Krida Kabinet Pembangunan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pemerataan hasil pembangunan, semua itu memerlukan pendekatan yang sangat berbeda dari masa lampau. Barangkali memang kebutuhan mendesak kita pada dasawarsa yang lampau adalah untuk peningkatan produktivitas secara total. Sekarang kita harus segera mengadakan revisi. Dalam peningkatan produktivitas, apabila golongan masyarakat rendah tidak menikmati perbaikan dalam taraf hidupnya, pasti akan menimbulkan keresahan yang semakin lama semakin berlarut dan semakin gawat. Pendekatan terhadap lapisan terbawah dari masyarakat kita harus segera dilakukan secara intensif. Barangkali dana-dana memang harus dialihkan dari sektor yang produktif secara materiil (pabrik-pabrik) kepada sektor peningkatan harkat martabat kemanusiaan. Mengingat bahwa kebocoran ataupun salah urus masih banyak terjadi, maka peralihan dana itu dapat dilakukan bila pemborosan atau

kebocoran dana masyarakat dapat dikontrol secara ketat. Dengan demikian dalih bahwa pemberian dana kepada sektor kesejahteraan akan mempengaruhi sektor produksi tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Yang paling inti dari masalah alokasi dana masyarakat adalah kenyataan adanya dana-dana dari masyarakat yang diperoleh melalui cara-cara tidak produktif (cara-cara korupsi). Korupsi adalah suatu hal yang tidak produktif dan sangat ganas akibatnya. Uang yang dikorup oleh Budiaji misalnya, jumlahnya Rp. 7 milyar. Bagi Budiaji uang itu adalah alat pemuas nafsu bersama kliknya. Uang itu jelas tidak produktif, tidak akan menghasilkan produksi apapun, sebab dipakai untuk foya-foya dan kepentingan pribadi. Barangkali yang untung adalah penjual barang mewah dan konsumsi tinggi yang menikmati hasil korupsi Budiaji. Tapi dunia industri Indonesia tidak mendapat nilai lebih atau tambahan kapasitas industri dari dana sebesar itu. Kalau dana itu langsung ditransfer dari Bulog kepada APBN, maka Jendral Yusuf, tanpa mengganggu atau membebani Prof. Widjojo dengan susah payah mengalihkan mata anggaran, barang kali cukup untuk memenuhi kenaikan uang lauk pauk seluruh prajurit ABRI, perlengkapan dan asrama prajurit.

Jadi peralihan dana sebetulnya bisa dilakukan apabila ada *kemauan politik* untuk mengatur agar dana-dana yang tersedia dalam masyarakat yang berada di tangan oknum-oknum pejabat benar-benar dimanfaatkan demi kepentingan bersama secara Nasional. Perdebatan mengenai prioritas dengan demikian juga kurang relevan. Prioritas adalah suatu cara bekerja yang dipakai apabila kita mempunyai beberapa tujuan atau sasaran, tapi sarana atau dana yang kita miliki terbatas. Karena itu harus ada yang bersedia mengalah, demi kepentingan yang lebih besar dalam pola yang strategis. Akan tetapi dengan contoh Budiaji, disamping kasus korupsi lainnya yang bernilai milyar, tampak bahwa dana masyarakat atau negara tampaknya cukup tersedia.

Strategi kembar peningkatan pembangunan (sektor industri dan produksi) serta pemerataan pembangunan (sektor kesejahteraan sosial) *harus bisa berjalan* tanpa mengorbankan peningkatan GNP.

Faktor Korupsi adalah penghambat bagi terlaksananya strategi kembar itu secara paralel dan simultan. Apabila Bapenas merencanakan bahwa Negara hanya punya dana sebesar Rp. 5 trilyun misalnya. Dari Rp. 5 trilyun sektor ekonomi (yang sangat penting untuk meningkatkan GNP dan produktivitas) diberi jatah Rp. 3 trilyun. Sisanya Rp. 2 trilyun harus dibagi untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Bidang Kesra ini harus mengalah, karena tidak bisa menghasilkan secara langsung bila dinilai dengan uang. Sedang Rp. 3 trilyun yang dipakai di sektor ekonomi diharapkan bakal menghasilkan tambahan pendapatan bagi negara. Baiklah, bidang kesra mengalah, demi peningkatan GNP dan kapabilitas negara kita agar sektor industri dengan dana sebesar Rp. 3 trilyun bisa menghasilkan peningkatan produktivitas dan pendapatan negara. Bidang kesra harus puas dengan asrama bocor, rumah sakit yang kurang peralatan, pendidikan yang pas-pasan, karena harus mengalah terhadap investasi sektor produksi. Karena itu kesejahteraan pegawai ataupun prajurit juga harus sabar menunggu kelak kalau dana sudah ada.

Sialnya dana itu tidak bakal tiba. Karena apa? Karena Rp. 3 trilyun sektor produksi itu ternyata sebagian dikorupsi oleh pelaksana dan petugas barangkali mencapai 30%. Dengan demikian produktivitas untuk sebagian sektor produksi barangkali tidak naik, malahan bisa merosot (seperti sektor pertanian). Sebab dana-dana itu tidak mengalir ke pabrik tapi mampir di kelab-malam, rumah-mewah, dan macam-macam praktek penghamburan oleh oknum-oknum yang dipercayakan memegang dana masyarakat tersebut. Dengan demikian dana Rp. 3 trilyun itu barangkali hanya Rp. 2 trilyun yang benar-benar sampai ke proyek atau pabrik yang dibangun.

Inilah sumber keresahan masyarakat. Masyarakat rela menderita di alam pembangunan. Relat bersabar menantikan kapan sekolah dan pengobatan gratis bagi seluruh rakyat. Karena disodori angka bahwa dana negara memang tidak ada, karena itu harus bersabar. Tapi kenyataan bahwa bermilyar rupiah uang negara yang dipercayakan kepada oknum-oknum tertentu ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (yaitu sektor produksi untuk meningkatkan dana negara) melainkan untuk

kenikmatan dan kemewahan segelintir oknum. Inilah kunci ketidakpuasan dan merosotnya loyalitas serta disiplin nasional. Ini pula yang menjadi ancaman bagi integrasi Nasional. Apabila demikian halnya, berarti sebetulnya uang atau dana yang bisa dipakai untuk meningkatkan bidang kesejahteraan sebetulnya bukan cuma Rp. 2 trilyun, tapi justru harus ditambah Rp. 1 trilyun yang dikorup secara beramai-ramai oleh sebagian oknum pejabat. Rp. 1 trilyun yang bocor tadi, bila dipakai untuk kesejahteraan rakyat pasti menghasilkan fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan/pemukiman yang sangat memadai bagi sebagian terbesar rakyat kita. Dan terlebih lagi, nilai kepercayaan kepada Pemerintah, kesediaan rakyat untuk berkorban pasti akan lebih besar lagi, karena benar-benar kita ini bergotong royong. Uang negara dan rakyat benar-benar dipergunakan bagi kemakmuran yang merata dan bukan bagi segelintir koruptor. Nilai kepercayaan dan solidaritas ini, kesediaan berkorban dan partisipasi yang aktif dalam pembangunan dan berkorban bersama-sama, adalah jauh lebih besar daripada Rp. 1 trilyun yang dihaburkan oleh sebagian kecil oknum koruptor.

BEBERAPA KESIMPULAN :

1. Jendral M. Yusuf dalam mengelola ABRI telah memberikan perhatian kepada faktor manusia agar memperoleh jaminan hidup yang layak sesuai harkat martabat kemanusiaan.
2. Falsafah ini adalah konkretisasi dari "basic needs strategy" yang seharusnya menjadi contoh juga di segenap bidang kehidupan kita, bukan cuma di lingkungan ABRI.
3. Kebutuhan prajurit akan nilai gizi yang layak adalah contoh mikro dari kebutuhan rakyat kita akan taraf hidup yang sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Kebutuhan ini *harus dan bisa dipenuhi oleh negara, sekarang, tanpa perlu menunggu peningkatan GNP, melainkan dengan pemanfaatan dana yang dimiliki masyarakat/negara* bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
4. Tanpa peralihan prioritas atau mata anggaran, pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan rakyat ini bisa diadakan bila kebocoran dan korupsi dibasmi habis. Contoh : 7 milyar uang negara yang dikorup oleh Budiaji pasti bisa meningkatkan fasilitas kesehatan dan pemukiman untuk jutaan

rakyat, tanpa mempengaruhi APBN, karena toh ternyata Rp. 7 milyar itu tidak dipakai untuk kepentingan proyek produksi, melainkan dikorup untuk oknum-oknum belaka. Contoh ini bisa diteruskan, misalnya kalau tidak terjadi "kekeliruan" soal tanker, kita tidak perlu membayar Yahudi Rappaport sebesar US \$ 150 juta atau Rp 60 milyar. Kalau Rp. 60 milyar ini dipakai guna membangun perumahan rakyat di pedesaan, barangkali bisa didirikan puluhan ribu rumah.

5. Jendral M. Yusuf tampaknya ingin melakukan suatu lompatan, tanpa perlu mempedulikan soal bagaimana memperoleh dana bagi kesejahteraan prajurit. Pokoknya bagi Menhankam yang sudah pernah berkecimpung di sektor produksi sebagai Menteri Perindustrian, maka dana-dana ada dalam masyarakat. Karena prajurit tidak bisa menunggu janji-janji lagi dan kondisi hidupnya hampir di bawah nilai manusiawi (misalnya asrama yang sangat berhimpit dan bobrok), maka diambil tindakan langsung, harus ada dana untuk perbaikan kesejahteraan hidup.
6. Tulisan ini bermaksud mendukung dan memberikan sumbangan pikiran yang lebih konsepsional dan strategis terhadap pendekatan manusiawi Jendral M. Yusuf. Pendekatan spontan yang mempunyai nilai strategis karena menempatkan faktor manusia sebagai faktor utama dalam sistem pembangunan kita harus ditunjang dengan pemikiran yang lebih mendasar untuk memperbaiki kepincangan yang ada, untuk menenteramkan keresahan yang ada. Keresahan ada karena ketidakadilan sosial yang diakibatkan keserakahan sementara oknum dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Ini adalah masalah yang sangat krusial. Gebrakan Yusuf dengan konsekwensi peralihan dana oleh Bappenas memang tidak terhindarkan. Tapi gebrakan Yusuf ini ditambah gebrakan Soedomo dengan Opstibnya diharapkan bisa mengatasi sumber keresahan masyarakat, yaitu ketidakpuasan lapisan terbawah dari rakyat karena merasa kurang diperhatikan kebutuhan dasar mereka, disamping ketidakpuasan karena segelintir oknum menikmati dana yang seharusnya dapat digunakan bagi kesejahteraan rakyat kecil.

Gebrakan Yusuf yang langsung terjun ke bawah memberikan perhatian bagi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia serta gebrakan Soedomo yang membuktikan bahwa Pemerintah tidak tinggal diam terhadap praktek penyalahgunaan uang negara sebetulnya merupakan bukti itikad baik Pemerintah dalam menanggapi aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Sayang bahwa sebagian politisi agak skeptis terhadap Opstib dan belum antusias terhadap gebrakan Yusuf. Kritik selalu lebih mudah dilontarkan, pujian selalu sulit untuk diucapkan. Apabila kalau memang ada motif politik untuk tidak memberikan pujian kepada saingan politik. ABRI sudah memelopori pembersihan korupsi dengan Opstib (walaupun masih harus lebih di-institutionil-kan) dan pendekatan basic needs strategy. Kapan kekuatan sosial lain menyusulnya? Kemunafikan dan cara berfikir politik-sektoris memang harus dihilangkan. Cara berfikir munafik dan a priori selalu mencari kesalahan orang lain, tidak mau mengakui kebenaran orang lain, menutupi kesalahan sendiri dan selalu ingin benar sendiri, kalau orang lain yang melakukan, tidak mau tahu. Inilah cara berfikir politik sempit, kerdil dan a priori terhadap sesama pelaku politik. Kita memang belum dewasa. Tulisan ini mengajak pembaca berfikir sehat dan kritis, tapi sekaligus dewasa dan sportif. Kalau ada waktunya Pemerintah salah kita harus mengoreksi dan mengkritik. Tapi pada waktu Pemerintah melakukan langkah positif, kita harus memberikan dorongan semangat. Jangan sok benar sendiri, nah inilah penyakit politisi kita. Manajemen ABRI "Gaya M. Yusuf" ini patut dijadikan contoh dalam mengelola negara kita. Falsafahnya jelas pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Mudah-mudahan juga dalam pembangunan Nasional gaya Yusuf bisa diterapkan.

DAFTAR PUBLIKASI — CSIS

I. *SERI BUKU*

- | | |
|--|---------------|
| 1. Some Basic Thoughts on the Acceleration and Modernization of 25 Years Development, Ali MOERTOPO | a Rp. 1.250,— |
| 2. Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun, Ali MOERTOPO | |
| 3. Dua pemikiran tentang Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional, Daoed JOESOEF | a Rp. 1.000,— |
| 4. The World of Strategy and the Foreign Policy of Nation | |
| 5. Economic Development and National Resilience, R.B. SOEHARTONO | a Rp. 500,— |
| 6. Persoalan Masa Kini: Perusahaan-perusahaan Multinasional, J. PANGLAYKIM | a Rp. 1.500,— |
| 7. Strategi Politik Nasional, Ali MOERTOPO | a Rp. 1.000,— |
| 8. Business Relations between Indonesia and Japan, J. PANGLAYKIM | a Rp. 500,— |
| 9. Indonesia dan Dunia Internasional 1974 | a Rp. 1.750,— |
| 10. Trends in Marketing, J. PANGLAYKIM | a Rp. 1.000,— |
| 11. Regionalism in Southeast Asia | a Rp. 1.250,— |
| 12. Buruh dan Tani dalam Pembangunan, Ali MOERTOPO | a Rp. 400,— |
| 13. Seminar Strategi Pembinaan Pengusaha Swasta Nasional | a Rp. 2.000,— |
| 14. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi luks) | a Rp. 1.200,— |
| 15. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi biasa) | a Rp. 300,— |
| 16. Self Reliance and National Resilience | a Rp. 1.250,— |
| 17. Second Indonesian — Japanese Conference | a Rp. 1.500,— |
| 18. Indonesia dan Dunia Internasional 1975 | a Rp. 4.000,— |
| 19. Indonesia dan Dunia Internasional 1976 | a Rp. 5.000,— |
| 20. Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia | a Rp. 2.000,— |
| 21. Japan — Indonesia Relations in the Context of Regionalism in Asia | a Rp. 1.500,— |
| 22. Indonesia's Economic and Business Relations with ASEAN and Japan, J. PANGLAYKIM | a Rp. 3.000,— |
| 23. Timur Tengah dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO | a Rp. 1.500,— |
| 24. Afrika dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO | a Rp. 1.500,— |
| 25. Southeast Asia and the World of Tomorrow | a Rp. 3.000,— |
| 26. Strategi Kebudayaan, Ali MOERTOPO | a Rp. 750,— |
| 27. Indonesia dan Dunia Internasional 1977 | a Rp. 5.000,— |
| 28. P-4 and GBHN (bhs Inggris) | a Rp. 600,— |
| 29. Japan — Indonesia Cooperation : Problems and Prospects | Rp. 1.500,— |

II. *TERBITAN BERKALA*

- | | | |
|--|-------------|------------------------|
| 1. RINGKASAN PERISTIWA
(terbit setiap 2 minggu) | a Rp. 350,— | Rp. 10.000,— per tahun |
| 2. ANALISA
(terbit setiap bulan) | a Rp. 700,— | Rp. 8.000,— per tahun |
| 3. MONOGRAF | a Rp. 700,— | |
| 4. THE INDONESIAN QUARTERLY
(terbit setiap 3 bulan) | a Rp. 800,— | Rp. 3.200,— per tahun |

Pesanan dengan pembayaran di muka. Untuk Seri Buku, pesanan luar kota ditambah ongkos kirim $\pm 15\%$; dialamatkan pada: CSIS, Biro Publikasi, Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telepon 349489

DAFTAR ISI ANALISA

TAHUN V, 1976

1. EKONOMI DUNIA DAN SISTEM KINGSTON

- N. ARSJAD, *Ciri-ciri Ekonomi Dunia Dasawarsa Tahun-tahun Tujuh puluhan*
- N. ARSJAD, *Kingston System: Sistem Moneter Internasional Baru*

2. ASEAN: PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA (I)

- J. PANGLAYKIM, *Kerjasama Ekonomi — Perdagangan ASEAN Beberapa Tanggapan atas Konsep ASEAN Free Trade Area*
- J. Soedjati DJIWANDONO, *ASEAN Sesudah KTT*

3. ASEAN: PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA (II)

- J. PANGLAYKIM, *Wilayah Perdagangan Selektif ASEAN: Suatu Kemungkinan Bentuk Kerjasama Ekonomi ASEAN*
- J. PANGLAYKIM, *Suatu Pemikiran Bagaimana Dapat Menilai Iklim Investasi di Negara-negara ASEAN dan Asia Umumnya*
- Daoed JOESOEF, *Renungan Mengenai Masalah Free Trade*

4. EKONOMI DAN MASYARAKAT MANUSIAWI

- Pintor SIMANDJUNTAK, *Strategi Kebutuhan Pokok*
- Tjipto SOEMARTONO, *Peranan Profesi Kedokteran dalam Menunjang Proses Akselerasi Modernisasi*
- Daoed JOESOEF, *Masalah Pola Industri, Sekuriti dan Independensi Ekonomi Nasional*

5. BUDAYA DAN PENDIDIKAN

- A.M.W. PRANARKA, *Merintis Jalan menuju Tata Dunia Yang Lebih Manusiawi*
- A.M.W. PRANARKA, *Elite En Massa — Suatu Catatan tentang Tulisan Prof. W.F. WERTHEIM*
- S. HARTO, *Kapasitas dan Produktivitas Perguruan Tinggi Kita masih Rendah*
- S. HARTO, *Beberapa Catatan Sekitar Masalah: Kullah Kerja Nyata*

6. UTARA — SELATAN & TIMUR — BARAT

- N. ARSJAD, *Peranan UNCTAD dan OPEC: Kerjasama atau Konfrontasi?*
- O. Abdul RACHMAN, *Perspektif Sekuriti di Samudra Indonesia*

ANALISA

7. PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

- Soedjono HOEMARDANI, *Peranan Pengawasan dalam Pembangunan*
- Rufinus LAHUR, *Catatan Mengenai "Waktu Pengajuan" Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU—APBN)*

8. NON—ALIGNMENT

- A.R. SUTOPO, *Non-Alignment dan Partisipasi Indonesia*
- Kirdi DIPOYUDO, *Suatu Tinjauan atas Gerakan Non-Blok*

9. NEGARA NON—BLOK DAN MASALAH HABITAT

- N. ARSJAD, *Negara-negara Non-Blok dan Masalah Ekonomi Dunia*
- Onny S. PRIYONO, *Habitat dalam Perspektif Hubungan Manusia*

10. SURIAH DI LIBANON DAN PENYELESAIAN RASIAL

- Kirdi DIPOYUDO, *Intervensi Suriah dalam Perang Saudara di Libanon*
- Kirdi DIPOYUDO, *Menuju Perdamaian Rasial di Afrika bagian Selatan*

11. MASALAH DANA INTERNASIONAL & NASIONAL

- N. ARSJAD, *Sidang Tahunan IMF — Bank Dunia 1976*
- J. PANGLAYKIM, *Kelambatan Perkembangan lembaga-lembaga Keuangan Nasional akan Memperbesar Ketergantungan pada Bank-bank Internasional*

12. BEBERAPA TINJAUAN TAHUN 1976

- Rufinus LAHUR, *Tinjauan Mengenai Beberapa Segi Daya Fungsional Aparatur Pelaksana Menjelang Tahun 1977*
- Kirdi DIPOYUDO, *Kompetisi Superpower di Benua Afrika*
- A.M.W. PRANARKA, *Situasi Sosial — Budaya Indonesia 1976*

TAHUN VI, 1977

1. BEBERAPA PROSPEK PERKEMBANGAN TAHUN 1977

- Kirdi DIPOYUDO, *Perkembangan di Afrika Bagian Selatan*
- A.R. SUTOPO, *Masalah Komunisme di Negara-negara ASEAN*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perkembangan Politik Dunia Arab*
- N. ARSJAD, *Perkembangan Dana Pinjaman Internasional dan Pengaruhnya pada Perekonomian Indonesia*

2. ASIA TENGGARA: PERKEMBANGAN DAN PROSPEKNYA

- Ali MOERTOPO, *Perkembangan di Asia Tenggara dalam Bidang Politik, Ekonomi dan Strategi dengan Titik Berat Khusus pada Hari Depan ASEAN*
- Kirdi DIPOYUDO, *Asia Tenggara dan Prospeknya: Suatu Tinjauan Umum*
- Parlaungan SIBARANI, *Sekitar Kepulauan Paracel dan Spratly*
- Bing P. LUKMAN, *Renungan Satu Tahun KTT ASEAN Bali*

3 + 4 BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN

- Rufinus LAHUR, *Organisasi Politik "Hasil Pembaharuan dan Penyederhanaan Kehidupan Politik"*
- F.X. SOEDIJANA, *Hukum Ekonomi*
- Ramzy TAJUDIN, *Strategi Akseptabilitas Sosial Organisasi*
- H. Anton DJAWAMAKU, *Agropolis: Pembangunan Desa dan Pengembangan Wilayah di Daerah Pedesaan*
- A. Rahman RANGKUTI, *Pengembangan Padi Gogo dalam Peningkatan Produksi Beras*
- Kirdi DIPOYUDO, *Demokrasi Pancasila*

5. KEPINCANGAN HUBUNGAN UTARA — SELATAN

- J. PANGLAYKIM, *Dengan Persetujuan Pemasaran Yang Serba Diatur, Negara-negara Industri Mau Menang Sendiri*
- J. PANGLAYKIM, *Perspektif Pertemuan Puncak London*
- N. ARSJAD, *Kerjasama Ekonomi Internasional Masa Kini dan Masalahnya: Dialog Utara — Selatan*
- J. PANGLAYKIM, *Keuntungan Lebih Besar Yang Dicapai Bank-bank Amerika Karena Bisnisnya Dengan Dunia Ketiga*

6+7 BEBERAPA PERKEMBANGAN INTERNASIONAL

- A.R. SUTOPO, *Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam SALT: Mencari Perimbangan Persenjataan Strategis*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perimbangan Kekuatan Baru di Asia Tenggara*
- O. ABDULRACHMAN, *Kawasan Timur Tengah Tak Kunjung Damai*
- Bing P. LUKMAN, *Gerakan Euro-Komunisme dan Supremasi Komunis Uni Soviet*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pergolakan di Kawasan Laut Merah*

8. PERKEMBANGAN ASEAN

- Bing P. LUKMAN, *Menjelang Dasawarsa ASEAN: Suatu Tinjauan Kulturil*
- N. ARSJAD, *Membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN: Mungkinkah Dicapai?*
- Bing P. LUKMAN, *Indocina Sparing Partner ASEAN*
- Christianto WIBISONO, *Perspektif Kompetisi Indonesia — Vietnam*
- A.R. SUTOPO, *Masalah Minoritas Muslim di Pilipina Selatan: Prospek Penyelesaian yang Menyeluruh*

9. GENERASI MUDA

- Pande Radja SILALAH, *Generasi Muda dalam Strategi Pembangunan di Masa Depan*
- S. HARTO, *Partisipasi Mahasiswa dalam Pembangunan Pedesaan*
- S. HARTO, *Perguruan Tinggi Swasta dalam sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia: Suatu Tinjauan, tentang Masalah Pembinaan dan Pengembangannya.*

ANALISA

10. JEPANG DAN POLITIK EKONOMI LUAR NEGERINYA

- J. PANGLAYKIM, *Perubahan-perubahan Politik dan Konsep Kerjasama, Keamanan dan Perbatasan Ekonomi Jepang*
- Pande Radja SILALAH, *Pandangan Jepang terhadap ASEAN Berubah?*
- J. PANGLAYKIM, *Doktrin Fukuda: Suatu Pandangan Bisnis*

11. BEBERAPA MASALAH DALAM NEGERI

- Rahman RANGKUTI, *Masalah Peningkatan Produksi Beras*
- F.X. SOEDIJANA, *Kebijaksanaan Perburuhan dalam Penanaman Modal Asing*
- N. ARSJAD, *Pasar Uang dan Pasar Modal di Indonesia: Perkembangan, Masalah dan Hambatannya*
- S. HARTO, *Masalah "Kultur Oposisi" dalam Demokrasi Pancasila*

12. BEBERAPA ULASAN TAHUN 1977

- Kirdi DIPOYUDO, *Timur Tengah Fokus Perhatian Dunia Tahun 1977*
- S. HARTO, *Masalah Kebebasan Ilmiah dan Kebebasan Mimbar pada Perguruan Tinggi*
- Rufinus LAHUR, *Tinjauan Dalam Negeri Tahun 1977*

TAHUN VII, 1978

I. PERSPEKTIF 1978

- J. PANGLAYKIM, *Indonesia dan Fokus Bisnis Internasional dalam Tahun 1978*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perlombaan Timur-Barat di Kawasan Samudera Hindia*
- N. ARSJAD, *Masalah Krisis Dollar Amerika Serikat dan Pengaruhnya atas Nilai Rupiah*

2. VIETNAM—KAMBOJA, SELAT MALAKA & MASALAH RASIAL

- A.R. SUTOPO, *Beberapa Segi Konflik Vietnam-Kamboja: Menuju Hegemoni Kawasan?*
- Asnani USMAN, *Kedudukan Selat Malaka Sebagai Perairan Teritorial dan Jalur Pelayaran Internasional ditinjau dari Segi Politik Internasional*
- Kirdi DIPOYUDO, *Masalah Rasial di Afrika Selatan*

3. PANCASILA ARTI DAN PENERAPANNYA

- Kirdi DIPOYUDO, *Negara dan Ideologi Negara-Suatu Pengantar*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pancasila Moral Bangsa Indonesia-Suatu Pengantar*
- Christianto WIBISONO, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*

DAFTAR PUBLIKASI CSIS

4. DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL

- Otto ABDULRACHMAN, *Dinamika dalam Hubungan Internasional*
- James CHACE, *Strategi Pembendungan Baru Amerika*
- Ali MOERTOPO, *Hubungan Mendatang antara Amerika Serikat Dan Asia Tenggara: Suatu Perspektif Asia Tenggara*
- Kirdi DIPOYUDO, *Menuju Penyelesaian Damai Masalah Namibia*

5. KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN

- Daoed JOESOEF, *Era Pengembangan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan*
- Daoed JOESOEF, *Pendidikan, Kebudayaan dan Pembentukan Manusia*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pelebagaan Pola Hidup Sederhana*
- Onny S. PRIJONO, *Suatu Dilemma untuk Ibu-ibu yang Bekerja*

6. STRATEGI GLOBAL DAN ASIA TENGGARA

- Jusuf WANANDI, *Segi-segi Politik-Keamanan Asia Tenggara*
- Hadi SOESASTRO, *Arah Percaturan Politik antara Uni Soviet dan RRC serta Pengaruhnya terhadap Asia Pada Umumnya dan Asia Tenggara pada Khususnya*
- Jusuf WANANDI, *Situasi Strategis Dunia dan Posisi Amerika Serikat serta Hubungannya dengan Asia Tenggara*

7. BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

- Kirdi DIPOYUDO, *Pancasila Moral Bangsa Indonesia — Arti Materiilnya*
- C.P.F. LUHULIMA, *Tempat-tempat Ilmu Sosial dan Kemanusiaan dalam Pengembangan Sistem Ilmu dan Teknologi Nasional — Suatu Pemikiran*
- J. PANGLAYKIM, *Wiraswasta [Entrepreneur] dan Perusahaan-perusahaan Pertumbuhan dan Pembangunan Sebagai Faktor Pertumbuhan Ekonomi Nasional*
- O. Sutomo ROESNADI, *Pengaruh Lingkungan Internasional terhadap Masalah Pembangunan di Dalam Negeri*

MONOGRAF

1. J. PANGLAYKIM BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG
MEMPERTINGGI KAPABILITAS DAN KAPASITAS
BANK—BANK SWASTA NASIONAL Rp. 700,—
2. A.M.W. PRANARKA, SITUASI KULTURIL DUNIA
DEWASA INI Rp. 700,—
3. KWIK Kian Gie, KREDIT MACET, DILEMMA
MASA KINI Rp. 700,—
4. Jusuf WANANDI, KEBIJAKAN LUAR NEGERI
PRESIDEN CARTER DAN PERANAN
KONGRES AS Rp. 700,—

Berlangganan ANALISA - Anda berarti memetik keuntungan.

Apabila Anda berminat mendapatkan ANALISA harga tiap eks Rp. 700,- masih ditambah ongkos kirim sekitar 15 %. Tapi bila Anda memilih untuk menjadi Pelanggan ANALISA, maka untuk langganan setahun (12 nomor penerbitan) Anda cukup hanya membayar Rp. 8.000,- sudah termasuk ongkos kirim. Istimewa bagi Mahasiswa akan memperoleh potongan khusus 10 % untuk langganan setahun (sertakan foto copy Kartu Mahasiswa Anda). Catatkan dari sekarang nama Anda sebagai Pelanggan ANALISA sekaligus mengirim uang langganannya.

FORMULIR LANGGANAN

Harap dicatat sebagai Pelanggan ANALISA

Nama : _____

Alamat : _____

Universitas * : _____

Untuk langganan selama setahun (12 nomor) mulai nomor : _____

Bersama ini kami kirim uang langganan Rp. 8.000,-/Rp. 7.200,-
melalui pos wesel atau _____

Mengetahui **

Pelanggan,

* khusus untuk Mahasiswa

** cap dan tanda tangan pihak Fakultas

Kirimkan Formulir ini kepada :

Centre for Strategic and International Studies

up. Biro Publikasi, Jl. Kesehatan 3/13 Jakarta Pusat, Telp. : 349489

MAJALAH ANALISA, RINGKASAN PERISTIWA, THE INDONESIAN QUARTERLY dan BUKU-BUKU CSIS dengan mudah bisa Anda dapatkan di

MEDAN : TB Deli; PEKANBARU: TB Penyalur Berita; PADANG: TB Panearan Ilmu, TB Pustaka Angrek; PALEMBANG: TB Sriwijaya; JAKARTA: TB Ihtiar, TB Gramedia, TB Tropen, TB Gunung Agung. TB BPK Gunung Mulia, TB Tamaddun, TB Tintamas; TB Djambatan; TB Kinta; TB Marco; TB Pradjnparamita, Bursa Buku Fak. Ekonomi UI; TB Jayakarta, TB Pelita, TB Indira; BANDUNG: TB Sumur Bandung, TB Karya Nusantara, TB Djawa, TB Gramedia; SEMARANG: TB Merbabu, TB Surya, TB Gajah Mada; JOGYAKARTA: TB Hien Hoo Sing, TB Kedaulatan Rakyat, TB Pembangunan; MAGELANG: TB Kedaulatan Rakyat; SURAKARTA: TB Budhilaksana; MALANG: TB Atoom; SURABAYA: TB Sari Agung; UJUNG Pandang: TB Bhakti Baru, Hasanuddin University Press; IRIAN JAYA: TB Gunung Agung; DENPASAR: TB Sumber Agung